



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI**

**TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



Jln. Perwira No. 148 Kelurahan Belakang Balok  
Kota Bukittinggi Telepon (0752) 8100835



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5,);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);



11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



## Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

## Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal;
- d. menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

## Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

## Pasal 5


- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

  
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR.....<sup>32</sup>...

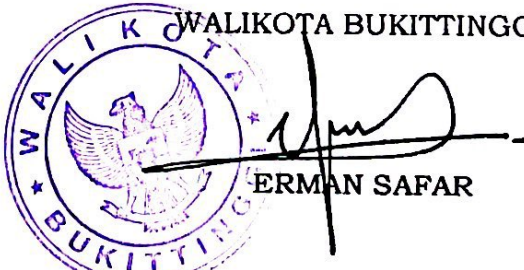


**LAMPIRAN:**  
**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2021**  
**TENTANG :**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH TAHUN 2021-2026**

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor Lampiran</b>	<b>Nama Renja Perangkat Daerah</b>
I.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
II.	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
III.	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
IV.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026
V.	Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2021-2026
VI.	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
VII.	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026
VIII.	Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
IX.	Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026
X.	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026
XI.	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026
XII.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026
XIII.	Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026
XIV.	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
XV.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026
XVI.	Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026
XVII.	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026
XVIII.	Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.
XIX.	Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026
XX.	Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026
XXI.	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026
XXII.	Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Tahun 2021-2026
XXIII.	Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
XXIV.	Renstra Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2021-2026
XXV.	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
XXVI.	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
XXVII.	Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026
XXVIII.	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,

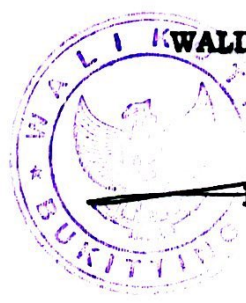
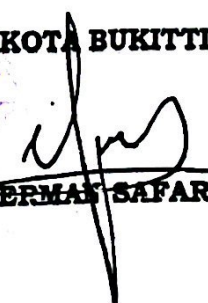


ERMAN SAFAR

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas P3APKB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun yang perlu dijaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan serta hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi, yang harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

 **WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasional RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan seta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, S.E., M.M.  
NIP. 19630629 198302 2 001





	Bukittinggi .....	
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	III-7
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS RPJMD .....	III-23
	5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
	1. Strategi .....	V-1
	2. Kebijakan .....	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	VI-1
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.....	VI-1
	2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	VI-3
	3. Program Perlindungan Perempuan .....	VI-3
	4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga .....	VI-4
	5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.....	VI-4
	6. Program Pemenuhan Hak Anak .....	VI-4
	7. Program Perlindungan Khusus Anak .....	VI-5
	8. Program Pengendalian Penduduk .....	VI-6
	9. Program Pembinaan Keluarga Berencana.....	VI-6



	10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera .....	VI-7
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
	1. Indikator Kinerja .....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP .....	VIII-1
	1. Pedoman Transisi .....	VIII-1
	2. Kaidah Pelaksanaan .....	VIII-1

**DAFTAR TABEL**

1	Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-15
2	Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	II-16
3	Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi .....	II-17
4	Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	II-33
5	Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB.....	II-35
6	Tabel 2.6 Target Capaian IDG Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 .....	II-53
7	Tabel 2.7 Tingkat Capaian Kota Layak Anak .....	II-55
8	Tabel 2.8 Perkembangan Program Keluarga Berencana .....	II-56
9	Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	II-57
10	Tabel 2.10 Daftar Prestasi Dinas P3APPKB Tahun 2020 .....	II-65
11	Tabel 2.11 Daftar Prestasi Dinas P3APPKB Tahun 2019 .....	II-70
12	Tabel 2.12 Daftar Prestasi Dinas P3APPKB Tahun 2018 .....	II-76
13	Tabel 2.13 Daftar Prestasi Dinas P3APPKB Tahun 2017 .....	II-83
14	Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan .....	III-4
15	Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPA Tahun 2020 – 2024 .....	III-9

16	Tabel 3.3 Permasalahan Dinas P3APPKB berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-14
17	Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.....	III-20
18	Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas P3APPKB .....	III-21
19	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	IV-2
20	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah .....	V-4
21	Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan .....	VI-9
22	Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026. ....	VII-2
23	Tabel 7.2 Target Capaian Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas P3APPKB Tahun 2021 s.d 2026 .....	VII-3



## DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah .....	I-2
2	Gambar 2.1 Piagam Penghargaan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	II-66
3	Gambar 2.2 Pelaksanaan Kuliah Umum Sekolah Keluarga .....	II-70
4	Gambar 2.3 Pemberian Piala Kota Layak Anak .....	II-73
5	Gambar 2.4 Piagam Penghargaan Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Tahun 2019 .....	II-74
6	Gambar 2.5 Pemenang Harapan II Gelar Dagang Produk UPPKS .....	II-75
7	Gambar 2.6 Harapan II Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik pada Penilaian Tk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 .....	II-76
8	Gambar 2.7 Pemberian Piala Kota Layak Anak Tahun 2019 .....	II-81
9	Gambar 2.8 Kota Bukittinggi memperoleh Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang Mendukung Kegiatan Sehari Belajar di Luar Kelas .....	II-82
10	Gambar 2.9 Pemberian Piala Kota Layak Anak Tahun 2017 .....	II-85
11	Gambar 2.10 Kota Bukittinggi memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Tahun 2017.....	II-86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

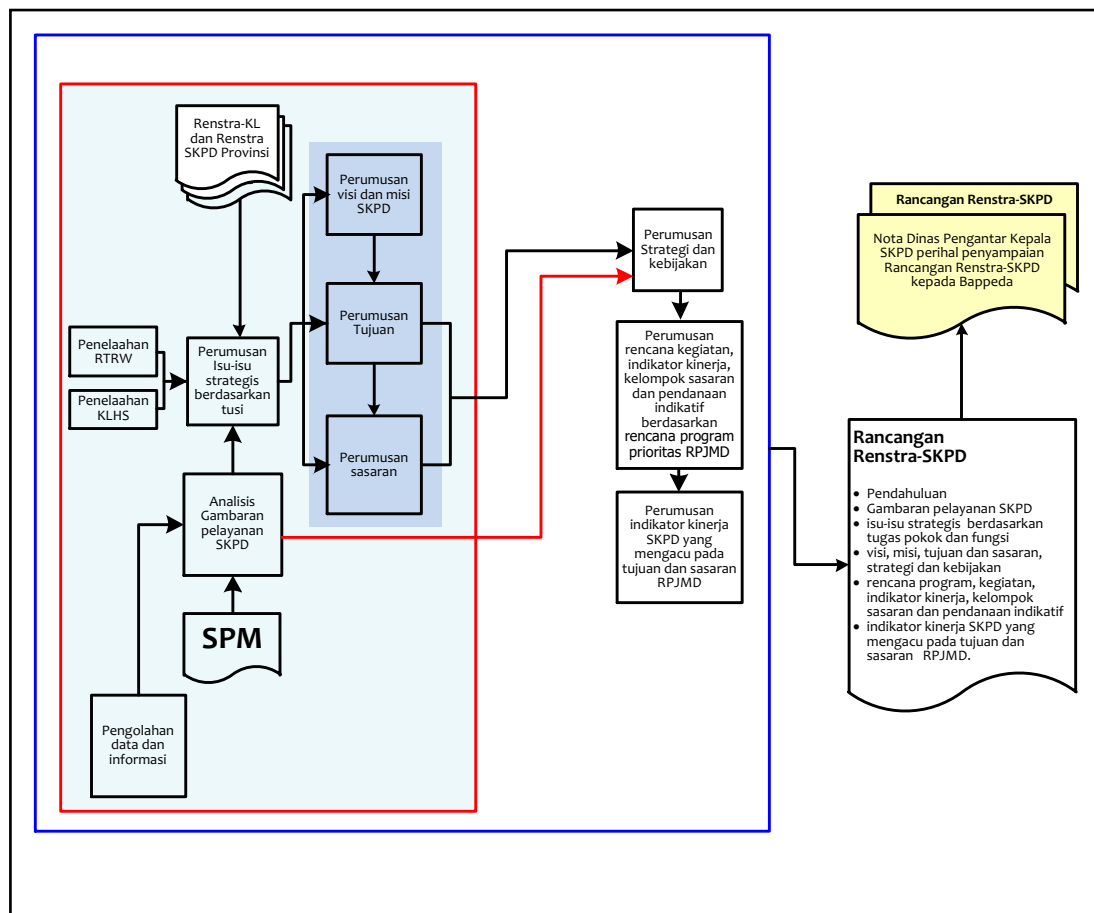
Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, RPJMD Kota Bukittinggi dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bukittinggi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
40. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
44. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 );
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);



48. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
49. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
50. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
51. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah,
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas P3APPKB untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan,
- 3) Fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas P3APPKB,
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dinas yang merupakan

dokumen perencanaan tahunan Dinas P3APPKB dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas P3APPKB, sumber daya Dinas, kinerja pelayanan Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas P3APPKB, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB.

##### **BAB V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas P3APPKB.

##### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas P3APPKB.

##### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas P3APPKB Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

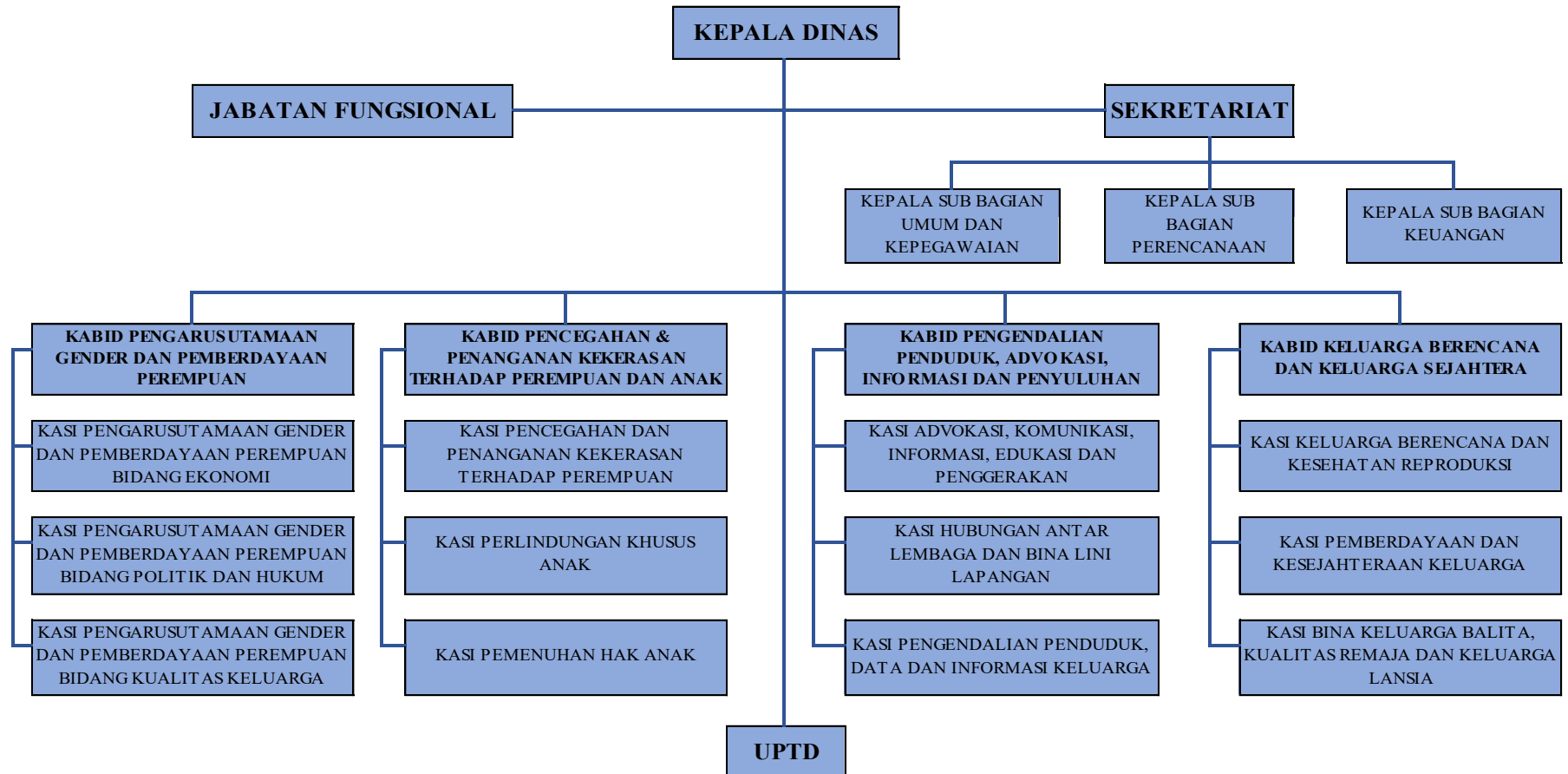
##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Perangkat daerah di Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian lahir Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut ini Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.



**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BUKITTINGGI**



Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (disingkat DP3APPKB) di atas, menggambarkan bahwa untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan tugas dan fungsinya oleh 2 (dua ) bidang yaitu Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan pula oleh 2 ( dua ) Bidang yaitu Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

### **2.1.2 Uraian Tugas**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi dan tugas dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Sekretaris dengan 3 (tiga) kepala Sub Bagian :
  - Subag Umum dan Kepegawaian,
  - Subag Keuangan,
  - Subag Perencanaan,
- c. Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP ) dengan 3 (tiga) Kepala seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Ekonomi,
  - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Sosial Politik dan Hukum,

- Kepala Seksi PUG dan PP bidang Kualitas Keluarga,
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2KPA) dengan 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan,
  - Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak,
  - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak,
- e. Kepala Bidang Keluarga Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi dan Penggerakan,
  - Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan,
  - Kepala Seksi pengendalian penduduk data dan informasi keluarga,
- f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ( KB/KS ) dengan 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
  - Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
  - Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
  - Kepala Seksi Bina Keluarga Balita , Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia,
- g. Kelompok jabatan fungsional,  
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas.**

Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB :

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dinas.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB :

- a. Menandatangani surat keluar Dinas dan dapat dikuasakan kepada Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan,
- b. Menyetujui Anggaran Belanja Dinas dan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran,
- c. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pencapaian program/kegiatan/ pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Kependudukan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,



- Kependudukan Keluarga Berencana , Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
- e. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, kependudukan, Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera dan pembangunan keluarga,
  - f. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah,
  - g. Merumuskan dan membuat kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis serta melakukan pembinaan terhadap administrasi kesekretariatan (umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan) dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga,
  - h. Bertanggung jawab dan mengkoordinir pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan , perlindungan anak, Pengendalian penduduk, kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
  - i. Melakukan monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan program kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,

- j. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **B. Sekretariat.**

Selanjutnya Rincian Tugas Sub Bagian umum (Sekretariat) adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan Asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas,
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja,
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas,
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas,
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas,
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **C. Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, bidang Pengarus utamaan Gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,

- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- c. Penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan bidang Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- f. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- g. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- i. Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- k. Penyiapan pelebagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,

- l. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan berlaku,
- m. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas,
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

**D. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2KPA)**

Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

- e. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang,
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,
- j. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- k. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- m. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- n. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,



- o. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- p. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- r. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- s. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- t. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- v. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- w. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,

- x. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak,
- y. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

#### **E. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan**

Bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,

- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- g. Pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur, dalam rangka penyelenggaraan pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- i. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- j. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk,
- k. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pergerakan serta pengendalian kuantitas penduduk,
- l. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/ petugas lapangan kb dan kader kb,
- m. Pelaksanaan pengendalian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- n. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya,
- p. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- q. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

#### **F. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis

serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- g. Fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- i. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di tingkat kota sampai ke kecamatan,
- j. Pelaksanaan pelayanan KB, jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB,
- k. Pembinaan dan pengembangan kualitas remaja, keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia,
- l. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga,
- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

- n. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	1		6	2	9
3	D3		4		1	5
4	S1	2	18	2	3	25
5	S2		6			6
6	S3					
T O T A L		3	28	8	6	45

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 45 orang yang terdiri dari 31 orang PNS ( 3 orang laki-laki ; 28 orang perempuan) dan 14 orang Non PNS (8 orang laki-laki ; 6 orang perempuan). Berdasarkan pendidikan sebanyak 6

orang berpendidikan S2, 25 orang berpendidikan S1, 5 orang berpendidikan D3 sederajat dan 9 orang berpendidikan SLTA sederajat.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II			
2	Golongan III	2	22	24
3	Golongan IV	1	6	7

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan golongan adalah sebanyak 31 orang yang terdiri dari 24 orang golongan III dan golongan IV sebanyak 7 orang.

#### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)**

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada kondisi Desember Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 (tahun terakhir)**

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Baik	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1
5	Portable Generating Set	Baik	1
6	Portable Generating Set	Rusak Berat	1
7	Portable Generating Set	Baik	1
8	Portable Generating Set	Baik	1
9	Stationary Generating Set	Baik	1
10	Portable Water Pump	Baik	1
11	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Baik	1
12	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Rusak Berat	1
13	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
14	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
15	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
16	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
17	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
18	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
19	Pick Up	Baik	1
20	Sepeda Motor	Rusak Berat	2
21	Sepeda Motor	Rusak Berat	1
22	Sepeda Motor	Rusak Berat	2
23	Sepeda Motor	Rusak Berat	1
24	Sepeda Motor	Baik	1
25	Sepeda Motor	Baik	1
26	Sepeda Motor	Baik	1
27	Sepeda Motor	Baik	1
28	Sepeda Motor	Baik	1
29	Sepeda Motor	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
30	Sepeda Motor	Baik	1
31	Sepeda Motor	Baik	1
32	Sepeda Motor	Baik	1
33	Sepeda Motor	Baik	1
34	Sepeda Motor	Rusak Berat	1
35	Sepeda Motor	Baik	1
36	Sepeda Motor	Baik	1
37	Sepeda Motor	Baik	1
38	Sepeda Motor	Baik	1
39	Sepeda Motor	Baik	1
40	Sepeda Motor	Baik	1
41	Sepeda Motor	Baik	1
42	Sepeda Motor	Baik	1
43	Sepeda Motor	Baik	1
44	Sepeda Motor	Baik	1
45	Sepeda Motor	Baik	1
46	Sepeda Motor	Baik	1
47	Sepeda Motor	Baik	1
48	Sepeda Motor	Baik	1
49	Sepeda Motor	Baik	1
50	Sepeda Motor	Baik	1
51	Sepeda Motor	Baik	1
52	Sepeda Motor	Baik	1
53	Sepeda Motor	Baik	1
54	Sepeda Motor	Baik	1
55	Sepeda Motor	Baik	2
56	Sepeda Motor	Baik	11
57	Sepeda Motor	Baik	1
58	Mobil Unit Penerangan Darat	Baik	1
59	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Rusak Berat	1
60	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Baik	2
61	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Rusak Berat	1
62	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Baik	1
63	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Baik	2
64	Mesin Absen (Time Recorder)	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
65	Lemari Besi/Metal	Baik	2
66	Lemari Besi/Metal	Baik	5
67	Lemari Besi/Metal	Baik	4
68	Lemari Besi/Metal	Baik	36
69	Lemari Kayu	Baik	2
70	Lemari Kayu	Baik	3
71	Lemari Kayu	Baik	3
72	Lemari Kayu	Baik	2
73	Lemari Kayu	Baik	2
74	Rak Besi	Baik	1
75	Rak Besi	Rusak Berat	1
76	Rak Besi	Baik	1
77	Rak Besi	Baik	9
78	Rak Kayu	Baik	1
79	Rak Kayu	Baik	1
80	Rak Kayu	Rusak Berat	1
81	Rak Kayu	Baik	3
82	Filing Cabinet Besi	Baik	2
83	Filing Cabinet Besi	Baik	1
84	Filing Cabinet Besi	Baik	2
85	Filing Cabinet Besi	Baik	1
86	Filing Cabinet Kayu	Baik	1
87	Filing Cabinet Kayu	Baik	1
88	Filing Cabinet Kayu	Baik	3
89	Filing Cabinet Kayu	Baik	1
90	Filing Cabinet Kayu	Baik	3
91	Filing Cabinet Kayu	Baik	1
92	Lemari Kaca	Baik	1
93	Lemari Kaca	Baik	1
94	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1
95	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1
96	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1
97	Papan Visual/Papan Nama	Baik	1
98	Papan Visual/Papan Nama	Baik	1
99	Papan Visual/Papan Nama	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
100	White Board	Baik	1
101	White Board	Rusak Berat	4
102	White Board	Baik	3
103	Alat Penghancur Kertas	Rusak Berat	1
104	Alat Penghancur Kertas	Baik	2
105	Alat Penghancur Kertas	Baik	1
106	Mesin Absensi	Rusak Berat	1
107	Mesin Absensi	Rusak Berat	1
108	Mesin Absensi	Rusak Berat	1
109	Mesin Absensi	Baik	1
110	Mesin Absensi	Baik	1
111	Overhead Projector	Baik	1
112	Overhead Projector	Baik	2
113	Overhead Projector	Hilang	1
114	Overhead Projector	Baik	1
115	Overhead Projector	Baik	1
116	Overhead Projector	Baik	4
117	LCD Projector/Infocus	Baik	1
118	Papan Nama Instansi	Rusak Berat	1
119	Papan Nama Instansi	Baik	1
120	Papan Nama Instansi	Baik	1
121	Papan Nama Instansi	Baik	1
122	Papan Nama Instansi	Baik	1
123	Papan Nama Instansi	Baik	1
124	Papan Pengumuman	Baik	1
125	Papan Pengumuman	Rusak Berat	1
126	Papan Pengumuman	Baik	1
127	Papan Pengumuman	Baik	1
128	Teralis	Baik	1
129	Sice	Rusak Berat	1
130	Meja Rapat	Baik	3
131	Meja Rapat	Baik	1
132	Meja Rapat	Baik	1
133	Meja Rapat	Baik	1
134	Meja Telepon	Rusak Berat	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
135	Meja Resepsionis	Baik	1
136	Meja 1/2 Biro	Baik	2
137	Meja 1/2 Biro	Rusak Berat	5
138	Meja 1/2 Biro	Baik	7
139	Meja 1/2 Biro	Rusak Berat	1
140	Meja 1/2 Biro	Baik	2
141	Meja 1/2 Biro	Baik	15
142	Meja 1/2 Biro	Baik	12
143	Meja 1/2 Biro	Baik	6
144	Meja 1/2 Biro	Baik	4
145	Kursi Rapat	Baik	12
146	Kursi Rapat	Baik	2
147	Kursi Rapat	Baik	4
148	Kursi Rapat	Baik	9
149	Kursi Rapat	Baik	12
150	Kursi Tamu	Baik	6
151	Kursi Putar	Baik	2
152	Kursi Putar	Rusak Berat	2
153	Kursi Putar	Rusak Berat	3
154	Kursi Putar	Baik	6
155	Kursi Putar	Baik	12
156	Kursi Putar	Rusak Berat	1
157	Kursi Putar	Rusak Berat	4
158	Kursi Putar	Baik	10
159	Kursi Putar	Rusak Berat	1
160	Kursi Putar	Rusak Berat	2
161	Kursi Putar	Baik	10
162	Kursi Putar	Baik	10
163	Kursi Putar	Baik	3
164	Kursi Putar	Baik	5
165	Kursi Putar	Baik	6
166	Kursi Putar	Rusak Berat	1
167	Kursi Putar	Baik	7
168	Kursi Putar	Baik	3
169	Kursi Putar	Baik	3

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
170	Kursi Putar	Baik	4
171	Kursi Putar	Baik	12
172	Bangku Tunggu	Baik	5
173	Bangku Tunggu	Baik	4
174	Bangku Tunggu	Rusak Berat	1
175	Kursi Lipat	Rusak Berat	1
176	Kursi Lipat	Baik	25
177	Meja Komputer	Baik	8
178	Meja Komputer	Baik	1
179	Meja Komputer	Baik	2
180	Sofa	Baik	1
181	Sofa	Baik	1
182	Sofa	Baik	1
183	Sofa	Baik	1
184	Sofa	Baik	1
185	Meubeleur lainnya	Baik	1
186	Meubeleur lainnya	Baik	3
187	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	1
188	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	1
189	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	1
190	Lemari Es	Baik	1
191	A.C. Window	Baik	1
192	A.C. Window	Baik	1
193	A.C. Split	Baik	2
194	A.C. Split	Baik	1
195	A.C. Split	Baik	1
196	A.C. Split	Baik	2
197	A.C. Split	Baik	1
198	A.C. Split	Rusak Berat	1
199	A.C. Split	Baik	1
200	A.C. Split	Baik	1
201	Kipas Angin	Baik	1
202	Kipas Angin	Baik	1
203	Kipas Angin	Baik	4
204	Kipas Angin	Baik	1



<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
205	Kipas Angin	Baik	2
206	Exhaust Fan	Baik	12
207	Alat Pendingin lainnya	Baik	4
208	Alat Pendingin lainnya	Baik	2
209	Kompas Gas (Alat Dapur)	Baik	1
210	Kompas Kompresor	Baik	1
211	Televisi	Baik	1
212	Televisi	Baik	1
213	Televisi	Baik	1
214	Televisi	Baik	1
215	Televisi	Baik	1
216	Televisi	Baik	1
217	Televisi	Baik	1
218	Televisi	Baik	1
219	Televisi	Baik	2
220	Televisi	Baik	1
221	Televisi	Baik	1
222	Televisi	Baik	1
223	Loudspeaker	Baik	2
224	Loudspeaker	Baik	1
225	Sound System	Baik	1
226	Karaoke	Baik	1
227	Wireless	Baik	1
228	Wireless	Rusak Berat	4
229	Wireless	Baik	2
230	Megaphone	Baik	1
231	Unit Power Supply	Rusak Berat	1
232	Unit Power Supply	Baik	1
233	Unit Power Supply	Baik	2
234	Unit Power Supply	Rusak Berat	1
235	Unit Power Supply	Rusak Berat	1
236	Unit Power Supply	Rusak Berat	1
237	Unit Power Supply	Baik	5
238	Unit Power Supply	Rusak Berat	1
239	Unit Power Supply	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
240	Stabilisator	Baik	2
241	Tustel	Baik	1
242	Tustel	Baik	4
243	Tustel	Baik	2
244	Tustel	Baik	1
245	Tustel	Baik	1
246	Tustel	Baik	2
247	Tustel	Baik	1
248	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Baik	1
249	Tangga Aluminium	Baik	1
250	Tangga Aluminium	Baik	1
251	Kaca Hias	Baik	1
252	Handy Cam	Baik	1
253	Handy Cam	Rusak Berat	1
254	Handy Cam	Baik	1
255	Karpet	Rusak Berat	1
256	Karpet	Rusak Berat	4
257	Karpet	Rusak Berat	2
258	Karpet	Baik	4
259	Karpet	Baik	1
260	Gordyin/Kray	Baik	1
261	Gordyin/Kray	Rusak Berat	1
262	Gordyin/Kray	Baik	5
263	Gordyin/Kray	Baik	1
264	Gordyin/Kray	Baik	1
265	Gordyin/Kray	Baik	9
266	Gordyin/Kray	Rusak Berat	1
267	Gordyin/Kray	Baik	1
268	Tangki Air	Baik	1
269	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	1
270	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	1
271	Alat Pemadam/Portable	Baik	5
272	Alat Pemadam/Portable	Baik	1
273	Alat Pemadam/Portable	Baik	1
274	Alat Pemadam/Portable	Baik	2

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
275	Alat Pemadam/Portable	Baik	4
276	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
277	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
278	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
279	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	3
280	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	1
281	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	2
282	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	2
283	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	7
284	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	1
285	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	10
286	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
287	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	7
288	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
289	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
290	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
293	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rusak Berat	1
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	1
295	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Rusak Berat	2
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	1
297	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	5
298	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rusak Berat	3
299	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	5
300	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
301	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	7
302	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	1
303	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Baik	2
304	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Baik	1
305	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Baik	1
306	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Baik	1
307	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Rusak Berat	1
308	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2
309	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
310	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2
311	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2
312	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2
313	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	1
314	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Rusak Berat	1
315	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	5
316	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	2
317	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	7
318	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	1
319	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	1
320	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	1
321	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	1
322	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	10
323	Compact Monitor Panel For Stereo	Baik	1
324	Layar Film/Projector	Baik	4
325	Telephone (PABX)	Baik	1
326	Pesawat Telephone	Baik	1
327	Pesawat Telephone	Baik	1
328	Telephone Mobile	Baik	1
329	Telephone Mobile	Baik	1
330	Telephone Mobile	Baik	1
331	Telephone Mobile	Baik	1
332	Telephone Mobile	Baik	1
333	Telephone Mobile	Baik	1
334	Telephone Mobile	Baik	1
335	Telephone Mobile	Rusak Berat	1
336	Telephone Mobile	Baik	1
337	Telephone Mobile	Baik	1
338	Telephone Mobile	Baik	1
339	Telephone Mobile	Baik	8
340	Facsimile	Baik	1
341	Facsimile	Baik	1
342	Publik Address (Lapangan)	Baik	1
343	Receiver STL/SHF	Baik	1
344	Receiver STL/SHF	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
345	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Kurang Baik	20
346	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Kurang Baik	21
347	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Kurang Baik	11
348	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Kurang Baik	15
349	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Baik	7
350	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	Baik	18
351	Alat Kedokteran lainnya	Kurang Baik	6
352	Alat Kedokteran lainnya	Kurang Baik	12
353	Alat Kedokteran lainnya	Baik	19
354	Mainframe (Komputer Jaringan)	Rusak Berat	1
355	Mainframe (Komputer Jaringan)	Rusak Berat	1
356	Mainframe (Komputer Jaringan)	Baik	1
357	P.C Unit	Rusak Berat	1
358	P.C Unit	Baik	1
359	P.C Unit	Rusak Berat	3
360	P.C Unit	Baik	2
361	P.C Unit	Baik	1
362	P.C Unit	Rusak Berat	1
363	P.C Unit	Baik	2
364	P.C Unit	Rusak Berat	2
365	P.C Unit	Baik	1
366	P.C Unit	Baik	1
367	P.C Unit	Rusak Berat	1
368	P.C Unit	Baik	3
369	P.C Unit	Baik	4
370	P.C Unit	Baik	2
371	P.C Unit	Baik	1
372	P.C Unit	Baik	1
373	P.C Unit	Baik	6
374	Laptop	Rusak Berat	1
375	Laptop	Baik	3
376	Laptop	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
377	Laptop	Rusak Berat	1
378	Laptop	Baik	1
379	Laptop	Baik	5
380	Laptop	Baik	1
381	Laptop	Baik	1
382	Laptop	Baik	1
383	Laptop	Baik	1
384	Laptop	Baik	1
385	Laptop	Baik	1
386	Laptop	Baik	1
387	Laptop	Baik	1
388	Laptop	Rusak Berat	1
389	Laptop	Baik	2
390	Laptop	Baik	1
391	Laptop	Baik	1
392	Laptop	Baik	1
393	Laptop	Baik	1
394	Laptop	Baik	1
395	Laptop	Baik	1
396	Laptop	Baik	1
397	Laptop	Baik	3
398	Laptop	Baik	1
399	Laptop	Baik	1
400	Laptop	Baik	1
401	Laptop	Baik	2
402	Laptop	Baik	1
403	Laptop	Baik	1
404	Laptop	Baik	1
405	Laptop	Baik	1
406	Laptop	Baik	1
407	Laptop	Baik	1
408	Laptop	Baik	1
409	Laptop	Baik	1
410	Laptop	Baik	1
411	Laptop	Baik	2



<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
412	Laptop	Baik	3
413	Laptop	Baik	5
414	Note Book	Baik	1
415	Card Reader (Peralatan Mainframe)	Baik	24
416	Card Reader (Peralatan Mainframe)	Baik	2
417	CPU (Peralatan Mainframe)	Rusak Berat	2
418	Hard Disk	Baik	2
419	Hard Disk	Baik	1
420	Hard Disk	Baik	1
421	Hard Disk	Baik	1
422	Hard Disk	Baik	1
423	Hard Disk	Baik	2
424	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	3
425	Monitor	Rusak Berat	1
426	Monitor	Baik	2
427	Monitor	Baik	2
428	Monitor	Baik	1
429	Monitor	Baik	1
430	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	2
431	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
432	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
433	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	3
434	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
435	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
436	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	2
437	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	3
438	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	4
439	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
440	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
441	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
442	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	2
443	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
444	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
445	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
446	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
447	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
448	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
449	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	3
450	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
451	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
452	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
453	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
454	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
455	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
456	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
457	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
458	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
459	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
460	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
461	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
462	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	3
463	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
464	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
465	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
466	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
467	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
468	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
469	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	6
470	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
471	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	3
472	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	2
473	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	1
474	External/ Portable Hardisk	Baik	2
475	External/ Portable Hardisk	Baik	2
476	External/ Portable Hardisk	Baik	2
477	External/ Portable Hardisk	Baik	1
478	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	1
479	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	2
480	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	2
481	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	2

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
482	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	2
483	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	2
484	Server	Baik	1
485	Server	Baik	1
486	Server	Baik	1
487	Router	Baik	1
488	Router	Baik	24
489	Peralatan Jaringan lainnya	Baik	1
490	Tenda	Rusak Berat	1
491	Tenda	Baik	3
492	alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya lainnya (dst)	Rusak Berat	25
493	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1
494	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1
495	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1
496	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	1
497	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	1
498	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	1
499	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	28
500	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	39
501	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	36
502	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	11
503	Hukum	Baik	12
504	Hukum	Kurang Baik	1
505	Hukum	Baik	16
506	Hukum	Baik	28
507	Hukum	Baik	15
508	Hukum	Baik	2
509	Hukum	Baik	1
510	Hukum	Baik	1
511	Hukum	Baik	1
512	Hukum	Baik	1
513	Hukum	Baik	1
514	Hukum	Baik	1
515	Hukum	Baik	1
516	Hukum	Baik	1

<b>No</b>	<b>Nama / Jenis Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>	<b>Jumlah Barang</b>
517	Hukum	Baik	1
518	Hukum	Baik	1
519	Hukum	Baik	1
520	Hukum	Baik	1
521	Hukum	Baik	1
522	Hukum	Baik	1
523	Hukum	Baik	1
524	Hukum	Baik	1
525	Hukum	Baik	1
526	Hukum	Baik	1
527	Hukum	Baik	1
528	Hukum	Baik	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**TABEL 2.4**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						REALISASI					CAPAIAN				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG, Kualitas Hidup, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,00 %	54,63 %	55,00 %	55,63 %	56,00 %	56 %	NA	54,63 %	57,97 %	54,63 %	60,51 %	NA	100,00 %	105,40 %	98,20 %	108,05 %
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kualitas Keluarga.	NA	NA	NA	NA	65,76	65,76	NA	NA	NA	NA	64,53	NA	NA	NA	NA	98,13 %
			Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE).	Madya	-	Utama	-	Utama	Utama	Madya	-	Utama	-	Utama	100 %	-	100%	-	100%

		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	-	Pratama	Pratama	Madya	-	-	100%	100%	100%	-
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65%	65%	65,2%	65,4%	65,6%	66	NA	63,79%	64,58%	68,07%	68,08%	NA	97,84%	98,75%	103,77%	103,78%
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates /ASFR 15-19)	NA	96	94	92	90	89	NA	96,04	6,52	0,53	7,52	NA	100,04%	144,10%	199,41%	191,64%
		Terwujudnya Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	NA	2,56	2,55	2,49	2,52	2,52	NA	2,68	2,60	2,52	2,55	NA	95,52%	98,08%	98,81%	98,82%



**TABEL 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015-2021 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Realisasi Tahun 2015	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke					Persentase Capaian pada Tahun ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>																					
46	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		✓	✓	60,83	70,84	71,84	72,84	73,84	74,84		-	62,11	62,19	-	-		86,46%	85,38%		
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																					
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>																					
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
2,1	Persentase partisipasi perempuan di		✓	✓								9,07%	8,41%	8,92%		50,19					

	lembaga pemerintah																				
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		✓	✓		8	8	8	12	12	12	8	8	8	8		100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	0,00%
2,3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		✓	✓			50%	50%	50%	50%	50%		43,8	45,85	-	76,48%					
2,4	Rasio KDRT		✓	✓								0,0007936	0,2	0,3558	0,1926	13,48					
2,5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		✓	✓												1,53%					
2,6	Partisipasi angkatan kerja perempuan		✓	✓	54%	54%	60%	55%	52,65%	53,65%	54,65%	60,10%	54,63%	57,97%		60,51%	111,30%	91,05%	105,40%	0,00%	112,79%
2,7	Cakupan perempuan dan anak		✓	✓		20	48	59	50	0,03%	40%	0,03%	0,07%	0,09%	0,08%	100%	-	-	-	-	-

	korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu																					
2,8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu		✓	✓		-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-

	tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit																				
2,9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		✓	✓		-	-	96	-	-		92,50%	90%	95,83%	100	-	-	-	-	-	-
2,10	Cakupan penegakan hukum dari		✓	✓		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,00 %

	tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak																					
2,11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		✓	✓		100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	90%	100%	100%	-	100,00%	90,00 %	100,00 %	100,00 %	-	
2,12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan		✓	✓		32	25	15	12	-		0,04%	0,04%	0,02%	0,02%	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	

	n dan anak korban kekerasan																				
2,13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		✓	✓		100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	93%	100%	100%	-	100,00%	93,00 %	100,00%	100,00%	-
2,14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		✓	✓	93,77	-	-	-	-	-		98,85	99,46	98,77	91,23	51,20%	-	-	-	-	-
2,15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		✓	✓	87,46	-	-	-	-	-		79,36	79,21	80,79	100,97	53,80%	-	-	-	-	-
2,16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		✓	✓	74,17	-	-	-	-	-		81,52	79,06	77,66	105,61	55,10%	-	-	-	-	-
2,17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Tinggi																				
2,18	Rasio melek huruf perempua n terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-	-	50,05%	-	-	-	-	-
2,19	Kontribusi perempua n dalam pekerjaan upahan di sector nonpertan ian		✓	✓			50	50	50	50	50	-	56,37	56,07	-	80,67	-	112,7 4%	112,1 4%	-	161, 34%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				
8,1	Laju pertumbu han penduduk (LPP)		✓	✓	1,77	-	-	-	-	1,49	1,3 8	1,71	1,68	1,56	1,55	1,55	-	-	-	-	104, 03%
8,2	Total Fertility Rate (TFR)		✓	✓		-	-	-	-	2,55						2,55	-	-	-	-	100, 00%



8,3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		✓	✓		-	-	-	-	-		10	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
8,4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5	-	-	-	-	-
8,5	Jumlah kebijakan (Peraturan		✓	✓	1 Aspek	-	-	-	-	5 aspek	5 aspek	1 Aspek	1 Aspek	1 Aspek	1 Aspek	-	-	-	-	-	-

	Daerah/Pe raturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendali an kuantitas dan kualitas penduduk																				
8,6	Jumlah sektor yang menyepak ati dan memanfaa tkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencana an dan pelaksana an program		✓	✓	3 Dinas	27 Di na s	27 Di na s	27 Di na s	27 Din as	27 Dinas	27	3 Dinas	3 Dinas	3 Dinas	3 Dinas	4 Dinas	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	14,8 1%

	pembangu nan																				
8,7	Jumlah kerjasama penyeleng garaan pendidika n formal, non formal, dan informal yang melakuka n pendidika n kependud ukan		✓	✓		-	-	6	6	6	6	-	-	3	3	2	-	-	50,00 %	50,00 %	33,3 3%
8,8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
8,9	Ratio Akseptor KB		✓	✓	1,81	-	-	-	-	1,34	1,2 6	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-
8,10	Angka pemakaia n kontrasep		✓	✓	54,95	65	65	65 ,2	65, 4	65,6	66	1,62	1,56	1,54	1,46	68,08	2,49 %	2,40 %	2,36 %	2,23 %	103, 78%

	si/CPR bagi perempua n menikah usia 15 - 49																				
8,11	Angka kelahiran remaja (perempua n usia 15- 19) per 1.000 perempua n usia 15- 19 tahun (ASFR 15- 19)		✓	✓		98	96	94	92	90	89	61,72	63,79	64,58	68,07	7,52	62,98 %	66,45 %	68,70 %	73,99 %	8,36 %
8,12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		✓	✓	47	-	-	-	-	10	10		96,04	65,23	-	19,88%	-	-	-	-	1,99 %
8,13	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi		✓	✓	28,04	-	-	-	-	9,05	9	37	16	17	17	12,93	-	-	-	-	142, 87%

	(unmet need)																				
8,14	Persentase Pengguna an Kontrasep si Jangka Panjang (MKJP)		✓	✓	38,12	-	-	-	-	44,2	45	20,03	19,64	19,51	9,69	32,4	-	-	-	-	73,30%
8,15	Persentase tingkat keberlangs ungan pemakaia n kontrasep si		✓	✓	37,15	-	-	-	-	48,2	50	40,42	39,67	40,43	32,84	89,2	-	-	-	-	185,06%
8,16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		✓	✓		-	-	-	-	72	74	42,1	43,17	45,23	45,86	77%	-	-	-	-	1,07%
8,17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-		✓	✓		-	-	-	-	66	68	-	76,46	74,41	70,74	85%	-	-	-	-	1,29%

	KB																				
8,18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		✓	✓		-	-	-	-	60	62	-	58,79	66,1	65,84	86%	-	-	-	-	1,43 %
8,19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	24,43	46,46	59,01	0	-	-	-	-	-
8,20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa		✓	✓		-	-	-	-	833,33	866,67	-	700	700	800	100	-	-	-	-	12,00%
8,21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan		✓	✓	24	24	100 %	100 %	100 %	100%	24	11	100%	100%	100%	78%	45,83 %	100,00%	100,00%	100,00%	78,00%

	Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk																					
8,22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		✓	✓		-	72 %	74 %	76 %	78%	80 %	-	68%	66%	58%	100%	-	94,44 %	89,19 %	76,32 %	128,21%	
8,23	Rasio petugas Pembantu		✓	✓	24	24	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	24	100%	100%	100%	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



	Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan																					
8,24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		✓	✓		-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	-	100%	100%	100%	100%	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100, 00%	
8,25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan		✓	✓		-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	-	100%	100%	100%	100%	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100, 00%	

	BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan																				
8,26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		✓	✓		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,28	Cakupan kelompok kegiatan yang		✓	✓		-	65 %	70 %	72 %	80%	85 %	-	70%	67%	70%	-	-	107,6 9%	95,71 %	97,22 %	-

	melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga																					
8,29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		✓	✓		-	65 %	68 %	68 %	68%	69 %	-	65%	65%	67%	66,80%	-	100,0 0%	95,59 %	98,53 %	98,2 4%	
8,30	Rata-rata usia kawin pertama wanita		✓	✓	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	21	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100, 00%	

8,31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		✓	✓	1.648.723.900	-	-	-	-	1.527.408.922		1.505.069.450	1.400.538.000	1.259.166.125	855.471.575	1.527.408.922	-	-	-	-	100,00%
8,32	Cakupan peserta KB aktif		✓	✓	11.433	70	70	70	70	70	70	10.088	10.496	10.604	11.328	68,08	1441 1,43 %	1499 4,29 %	1514 8,57 %	1618 2,86 %	97,26%

### 2.3.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan United Nations Development Programs (UNDP). IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.6**  
**Target Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1	2016	64,51
2	2017	62,71
3	2018	62,19
4	2019	60,99
5	2020	60,33

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Bukittinggi tahun 2016 sebesar 64,51, tahun 2017 sebesar 62,71, tahun 2018 sebesar 62,19, tahun 2019 sebesar 60,99, tahun 2020 sebesar 60,33. Dari uraian tersebut terlihat, indeks pemberdayaan gender 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Peran perempuan dalam dunia kerja setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apabila kita lihat struktur penduduk Kota Bukittinggi lebih banyak jumlah perempuan dari pada laki-lakinya.

Kota Layak Anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang diukur melalui 24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan kategori :

- Pratama;
- Madya;
- Nindya;
- Utama dan ;
- Kota Layak Anak (KLA).

Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak kategori Madya pada tahun 2019 dan 2021. Dari 24 indikator yang harus dipenuhi, ada dua indikator umum yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Dua indikator itu yakni :

1. tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyangkut adanya peraturan perundang – undangan pemenuhan hak anak dan adanya kebijakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak.
2. Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak.

Disamping itu tersedianya SDM terlatih di Kota layak anak juga harus dipenuhi, juga tersedianya data terpilah dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

Kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Bukittinggi tidak hanya semata untuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga untuk pengembangan 4 hak dasar anak melalui berbagai program, diantaranya dengan meningkatkan derajat kesejahteraan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan pra sekolah, pendidikan wajib belajar dan program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

**Tabel 2.7**  
**Tingkat Capaian Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 - 2020**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kategori Capaian Kota Layak Anak</b>
1	2017	Pratama
2	2018	Pratama
3	2019	Madya
4	2020	-

Semenjak tahun 2017 Kementerian PPPA berkomitmen untuk melakukan penilaian Kota Layak Anak setiap tahunnya, namun Pada tahun 2020 Penilaian Kota Layak Anak tidak dilakukan oleh Kementerian PP-PA karena pandemi Covid-19.

### **2.3.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 124.297 jiwa, terdiri dari 62.289 jiwa laki laki atau 50,11% dan 62.008 jiwa perempuan atau setara dengan 49,89%. Struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan ke semua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif ( 18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif ( $\leq 17$  s/d  $\geq 66$  tahun ). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus



memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumber dayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “a window of opportunity” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penangguhan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

**Tabel 2.8**

**Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi  
Tahun 2016 - 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta Program KB Aktif	10.088	10.469	10.604	11.328	11.072
2	Jumlah Peserta Program KB Baru	-	3.864	3.581	2.633	2.558
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	-	16.455	16.421	16.641	16.236
4	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	-	10.496	10.604	11.328	11.072

Tabel 2.9

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi  
Tahun 2016 -2020 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	459.940.300	630.078.216	722.687.075	623.238.050	412.157.911	419.877.147	549.743.958	652.792.444	611.736.004	391.179.159	91,29 %	87,25 %	90,33 %	98,15 %	94,91 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.950.000	85.500.000	156.656.750	15.000.000	82.414.711	140.365.000	55.498.420	139.325.500	15.000.000	81.435.989	99,58 %	64,91 %	88,94 %	100,00 %	98,81 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	14.122.150	-	-	-	-	13.900.150	-	-	-	-	98,43 %	-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	5.100.000	6.338.400	-	-	-	5.083.900	6.266.100	-	-	-	99,68 %	98,86 %	-	-	-
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.800.000	-	-	-	13.800.000	19.800.000	-	-	-	13.622.000	100,00 %	-	-	-	98,71 %
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	48.085.500	270.678.500	337.562.850	-	3.109.000	43.587.500	261.095.401	331.855.032	-	3.095.000	90,65 %	96,46 %	98,31 %	-	99,55 %

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	271.519.450	216.231.536	321.702.595	371.523.200	202.282.993	233.015.700	204.845.302	289.816.821	368.772.718	201.446.339	85,82 %	94,73 %	90,09 %	99,26 %	99,59 %
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	216.004.000	263.227.700	264.013.000	434.788.296	-	209.822.997	247.059.028	258.476.790	432.991.048	-	97,14 %	93,86 %	97,90 %	99,59 %
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	453.361.500	1.959.318.050	1.183.725.080	1.015.285.250	148.930.644	428.282.673	1.743.643.701	1.150.386.389	994.634.850	145.793.447	94,47 %	88,99 %	97,18 %	97,97 %	97,89 %
10	Program Keluarga Berencana	3.201.484.661	3.622.709.161	1.678.260.340	2.000.480.000	1.847.775.172	1.362.514.006	2.726.754.708	1.493.788.316	1.746.582.387	1.814.387.423	42,56 %	75,27 %	89,01 %	87,31 %	98,19 %
11	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	216.245.650	199.753.000	129.231.985	21.375.000	-	206.952.353	194.886.000	127.491.050	21.360.900	-	95,70 %	97,56 %	98,65 %	99,93 %	-
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	-	18.000.000	17.999.900	26.700.000	-	-	17.120.000	17.699.820	13.200.000	-	-	95,11 %	98,33 %	49,44 %	-
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	170.995.300	-	60.936.870	-	61.067.500	169.374.003	-	59.050.600	-	60.507.610	99,05 %	-	96,90 %	-	99,08 %
14	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat	214.518.000	-	-	-	-	206.684.637	-	-	-	-	96,35 %	-	-	-	-

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	86.200.000	107.883.900	11.430.000	-	-	80.413.150	106.481.798	9.793.200	-	-	93,29 %	98,70 %	85,68 %	-
16	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	-	-	-	674.149.575	173.924.025	-	-	-	672.117.071	169.698.245	-	-	-	99,70 %	97,57 %
<b>TOTAL</b>		5.202.000.361	7.324.933.013	4.979.875.045	5.023.194.075	3.380.250.252	3.235.536.919	6.063.989.887	4.615.746.798	4.711.673.920	3.314.156.260	62,20 %	82,79 %	92,69 %	93,80 %	98,04 %

Berdasarkan Tabel di atas, capaian tertinggi persentase realisasi anggaran lima tahun terakhir terdapat pada tahun 2020 sebesar 98,04%, pada tahun 2020 tersebut kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan seluruh anggaran dapat terealisasi dengan baik yang berprinsip efektif dan efisien. Begitu juga untuk capaian realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 82,79%, pada tahun 2018 sebesar 92,69%, dan pada tahun 2019 sebesar 93,08%. Hal ini dapat dikatakan bahwa capaian persentase realisasi anggaran dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Sementara capaian terendah terdapat pada tahun 2016 sebesar 62,20%, hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya anggaran DAK Fisik sisa Tahun 2010- 2015 karena tidak adanya petunjuk teknis dari BKKBN.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

### **2.4.1 Kelemahan (Weakness)**

- a. Keterbatasan anggaran pendukung dari APBD pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi tuntutan beban kerja.
- c. Sarana dan prasarana belum memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.

### **2.4.2 Kekuatan (Strenght)**

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Adanya regulasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Perda.
- c. Adanya program Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan.
- d. Adanya regulasi tentang pengendalian kuantitas penduduk berupa Perwako
- e. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030.

### **2.4.3 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas P3APKB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Tingginya keinginan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi politik.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih ada sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- j. Belum semua pembangunan yang responsif gender.
- k. Belum semua masyarakat menikmati program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
- l. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga lini lapangan Keluarga Berencana.
- m. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB

#### 2.4.4 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Terbukanya peluang kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender (PUG), Perlindungan Anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- d. Adanya Potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan program oleh organisasi perempuan, Satgas, Forum anak, BKB, BKR, BKL, Puskesmas, Bidan Praktek Swasta (BPS) dan organisasi lainnya.
- f. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat untuk Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan data diatas maka dapat jabarkan analisa SWOT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Analisa SW

1. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b. Analisa OT

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama pemerintah antara, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
3. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
5. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
6. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kota layak anak.
7. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.



c. Analisa ST

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
4. Meningkatkan KIE tentang progam KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
5. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB.
6. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.

d. Analisa OW

Tidak ada hubungan yang signifikan antara peluang yang ada dengan kelemahan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## 2.5 Penghargaan dan Prestasi Dinas P3APPKB

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan dan prestasi sebagai berikut :

### 2.5.1 Penghargaan dan Prestasi Tahun 2020

**Tabel 2.10**

**Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2020**

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasio nal/Regional/I nternasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
1	Inovasi Pelayanan Publik Sekolah Keluarga dari Kemen PAN-RB	Walikota Bukittinggi	Nasional	TOP'99 Inovasi Pelayanan Publik Sekolah Keluarga dari Kemen PAN-RB
2	Penghargaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP) dari Kemen PPPA-RI	Walikota Bukittinggi	Nasional	
3	Penobatan Ayah GenRe Kategori Kreator dari BKKBN Sumbar	Pusat Informasi Koseling Remaja Humaira Bukittinggi	Provinsi	
4	Ajang Kreatifitas GenRe dari BKKBN	Forum Generasi Berencana Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Ajang Kreatifitas GenRe dari BKKBN
5	Pemilihan Duta Generasi Berencana dari BKKBN	Forum Generasi Berencana Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III Pemilihan Duta Generasi Berencana dari BKKBN
6	Lomba Gerakan PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara Umum Lomba Gerakan PKK
7	Lomba Kelompok Dasa Wisma Berprestasi	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I Lomba Kelompok Dasa Wisma Berprestasi
8	Lomba Tertib Administrasi PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Lomba Tertib Administrasi PKK
9	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja
10	Lomba UP2K PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III Lomba UP2K PKK
11	Lomba HATINYA PKK	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Harapan I Lomba HATINYA PKK
12	Penilaian IVA Test	Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I Penilaian IVA Test

**Gambar 2.1**

**Piagam Penghargaan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia  
kepada Kota Bukittinggi**





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 189 TAHUN 2020

TENTANG

TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 DAN 15 FINALIS  
KELOMPOK KHUSUS KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan pengembangan inovasi pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

-2-

- 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 DAN 15 FINALIS KELOMPOK KHUSUS KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Urutan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.



-3-

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



HAJJO KUMOLO

-16-

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK
86	Pemerintah Kota Bukittinggi	Sekolah Keluarga	Pendidikan	Dinas P3APKB	Umum
87	Pemerintah Kota Denpasar	MAYA SI TEKMAS (Manajemen Layanan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) Berbasis Teknologi dan Masyarakat	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Umum
88	Pemerintah Kota Gorontalo	Tanda Aman Calon Pengantin (TANCAP NIKAH) Menuju Generasi Unggul	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
89	Pemerintah Kota Jambi	BANGKIT BERDAYA (Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya)	Pemberdayaan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Umum
90	Pemerintah Kota Magelang	INOBEL I-STEM/STEAM	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Umum
91	Pemerintah Kota Makassar	Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
92	Pemerintah Kota Malang	SEPASAR PEDAS (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas)	Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Umum
93	Pemerintah Kota Mojokerto	GAYATRI (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Umum
94	Pemerintah Kota Padang	Ayo Ceting (Cegah Stunting)	Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Andalas	Umum

**Gambar 2.2**

**Pelaksanaan Kuliah Umum Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi**



**2.5.2 Penghargaan dan Prestasi Tahun 2019**

**Tabel 2.11**

**Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Tahun 2019**

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
1	Kota Layak Anak Kategori Madya	Pemerintah Kota Bukittinggi	Nasional	Naik tingkat dari tahun sebelumnya (Pratama)
2	Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (Taman bypass, SBY Bukittinggi)	Walikota Bukittinggi	Nasional	Prestasi RBRA berhasil dipertahankan sejak Tahun 2018 (2 tahun berturut-turut)

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan publik	Pemerintah Kota Bukittinggi	Provinsi	Harapan II pada penilaian Tk Provinsi Sumatera Barat.
4	Pemenang Harapan II Gelar Dagang produk UPPKS dalam rangka puncak peringatan Harganas XXVI tk Prop Sumatera Barat tahun 2019		Provinsi	Pemenang Harapan II Gelar Dagang produk UPPKS dalam rangka puncak peringatan Harganas XXVI tk Prop Sumatera Barat tahun 2019
5	Juara 3 Genre Adventure Genre Fellowship Goes to 5GE Tk Prop. Sumatera Barat Tahun 2019	PIKR Gabungan Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara 3 Genre Adventure Genre Fellowship Goes to 5GE Tk Prop. Sumatera Barat Tahun 2019 yang diikuti oleh SMA 5 Bukittinggi dan MAN 2 Bukittinggi
6	Juara III Lomba Biduak Keluarga.		Provinsi	Juara III Lomba Biduak Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat
7	Juara I Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi Tk. Propinsi Sumbar thn 2019	Kelurahan Manggis Ganting	Provinsi	Juara I Pelaksana terbaik gerakan PKK Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi Tk. Propinsi Sumbar thn 2019
8	Juara III LBS pada Lomba KKG PKK KKBPK Kesehatan Tk. Nasional Thn 2019	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Nasional	Juara III Pelaksana terbaik gerakan PKK LBS pada Lomba KKG PKK KKBPK Kesehatan Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
9	Juara Umum gerakan PKK thn 2019 Tk.Prop.Sumbar	PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara Umum Pelaksana terbaik gerakan PKK thn 2019 Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
10	Juara II Lomba tertib administrasi PKK Tk.Propinsi Sumbar thn 2019	Kelurahan Belakang Balok	Provinsi	Pelaksana terbaik tertib administrasi PKK Provinsi Sumatera Barat th 2019



NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
11	Juara I Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja Tk.Provinsi Sumbar thn 2019	Kelurahan Puhun Tembok	Provinsi	Pelaksana terbaik kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
12	Juara II Lomba administrasi UP2K Tk. Prop.Sumbar 2019	Kelurahan Manggis Ganting	Provinsi	Juara II Kategori Kota Pelaksana terbaik gerakan PKK bidang pelaksanaan Lomba administrasi UP2K Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
13	Juara III lomba Hatinya PKK Tk.Prop.Sumbar thn 2019	Kelurahan Pulai Anak Air	Provinsi	Juara III lomba Hatinya PKK Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
14	Juara II Pelaksanaan IVA Test. Tk. Prop.Sumbar th 2019	Kecamatan MKS	Provinsi	Juara II Kategori Kota Pelaksana terbaik gerakan PKK bidang pelaksanaan IVA Test. Tk. Provinsi Sumatera Barat th 2019
15	Pakarrti Madya III Tk. Nasional dalam lomba Hatinya PKK thn 2019	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Nasional	Pelaksana Terbaik Pakarrti Madya III Tk. Nasional dalam lomba Hatinya PKK thn 2019

**Gambar 2.3**

**Pemberian Piala Kota Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota Bukittinggi**



**Gambar 2.4**

**Piagam Penghargaan Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Bypass SBY Kota Bukittinggi diberikan kepada Walikota Bukittinggi Tahun 2019**





**Gambar 2.5**

**Pemenang Harapan II Gelar Dagang produk UPPKS dalam rangka puncak  
Peringatan Harganas XXVI Tk Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2019**



**Gambar 2.6**

**Harapan II Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik  
pada penilaian Tk Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2019**



**2.5.3 Penghargaan dan Prestasi Tahun 2018**

**Tabel 2.12**

**Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2018**

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
1	Kota Layak Anak	Pemerintah Kota Bukittinggi	Nasional	Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan Kota Layak anak kategori Pratama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak R.I.

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
2	Pelopor Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2018.	Walikota Bukittinggi	Nasional	Walikota Bukittinggi memperoleh penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelopor Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2018.
3	Kepala Daerah yang mendukung kegiatan sehari belajar di luar kelas melalui surat edaran.	Walikota Bukittinggi	Nasional	Walikota Bukittinggi memperoleh penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Daerah yang mendukung kegiatan sehari belajar di luar kelas melalui surat edaran.
4	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pemerintah Kota Bukittinggi	Nasional	Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori utama oleh Presiden RI yang merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
5	Manggala Karya Kencana	H.M Ramlan Nurmatias, SH (Walikota Bukittinggi)	Nasional	Penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan kepada Walikota atas prestasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar serta kepemimpinannya dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayahnya.
6	Manggala Karya Kencana	Ny. Hj. Yessi Ramlan Nurmatias (Ketua TP.PKK Kota Bukittinggi)	Nasional	penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan kepada Ketua TP.PKK atas prestasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar serta kepemiminannya dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayahnya.
7	Juara III lomba Ustad/ustadzah Genre	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III lomba ustad/ustadzah Genre pada jambore dan ajang temu kreatifitas Genre dan perkemahan Bakti Saka Kencana Tk. Prov Sumbar 2018.
8	Juara III lomba Pionering	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III lomba Pionering pada jambore dan ajang temu kreatifitas Genre dan perkemahan Bakti Saka Kencana Tk. Prov Sumbar 2018.
9	Juara I lomba Ranking I Hebat	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I lomba Ranking I Hebat pada jambore dan ajang temu kreatifitas Genre dan perkemahan Bakti Saka Kencana Tk. Prov Sumbar 2018.

NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
10	Juara I lomba Fun Cooking Genre	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I lomba Fun cooking Genre pada jambore dan ajang temu kreatifitas Genre dan perkemahan Bakti Saka Kencana Tk. Prov Sumbar 2018.
11	Juara III lomba Flashmob Genre	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara III lomba flashmob Genre pada jambore dan ajang temu kreatifitas Genre dan perkemahan Bakti Saka Kencana Tk. Prov Sumbar 2018.
12	Juara II Apresiasi Kelompok PIK - Remaja jalur Pendidikan.	Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - Remaja) "MCC Arrahman" MAN 1 Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara II apresiasi kelompok PIK - Remaja Jalur Pendidikan Tingkat Prov Sumbar dalam rangka peringatan Harganas ke XXV Tk. Provinsi Sumbar Tahun 2018.
13	Pakarti Madya I - Tingkat Nasional Pelaksana terbaik PKK KKBPK - Kesehatan Kategori Kota Tahun 2018.	Kota Bukittinggi, Kecamatan ABTB, Kelurahan Belangan Balok	Nasional	Prakarti Madya I - Tingkat Nasional pelaksana terbaik PKK KKBPK- Kesehatan Kategori Kota Tahun 2018.
14	Pakarti Madya II - Tingkat Nasional Pelaksana terbaik tertib administrasi PKK Kategori Kota.	Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah.	Nasional	Pakarti Madya II - Tingkat Nasional Pelaksana terbaik tertib administrasi PKK Kategori Kota Tahun 2018.
15	Juara Umum Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara Umum Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
16	Terbaik I Kategori Kota pelaksana terbaik kegiatan PKK - KB - kes.	Kelurahan Belakang Balok	Provinsi	Terbaik I Kategori Kota pelaksana terbaik kegiatan PKK - KB - kes.
17	Terbaik I Kategori Kota pelaksana terbaik Gerakan PKK Bidang Pemanfaatan Lahan Pekarangan (HATINYA PKK)	Kelurahan Campago Guguk	Provinsi	Pelaksana terbaik Gerakan PKK Bidang Pemanfaatan Lahan Pekarangan (HATINYA PKK) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.



NO	URAIAN PRESTASI	NAMA PEMENANG (Perorangan/Tim /lembaga)	TINGKAT PRESTASI (Provinsi/Nasional/Regional/Internasional)	KET (Deskripsi Prestasi)
18	Juara I Lomba Penyuluhan Pengolahan sampah	TP.PKK Kota Bukittinggi	Provinsi	Juara I Lomba Penyuluhan Pengolahan sampah pada Jambore terpadu Kader PKK Berprestasi, Pencanangan BBGRM, Gelar TTG, Penyuluhan Kesehatan dan Jambore IMP - PLKB.
19	Terbaik II Kategori Kota pelaksana terbaik gerakan PKK Bidang Tertib Administrasi PKK	Kelurahan Puhun Tembok	Provinsi	Terbaik II Kategori Kota pelaksana terbaik gerakan PKK Bidang Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
20	Terbaik II Kategori Kota pelaksana terbaik kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kelurahan Belakang Balok	Provinsi	Pelaksana terbaik kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada lomba kegiatan Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes Tahun 2018.
21	Terbaik II Kategori Kota pelaksana terbaik gerakan PKK Bidang Pola asuh anak dan remaja	Kelurahan Belakang Balok	Provinsi	Pelaksana terbaik Gerakan PKK Bidang Pola Asuh Anak dan Remaja pada lomba Gerakan PKK
22	Terbaik III Kategori Kota Pelaksana terbaik Kegiatan Posyandu	Kelurahan Belakang Balok	Provinsi	Pelaksana terbaik kegiatan Posyandu pada lomba kegiatan Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes Tahun 2018.
23	Harapan I Kategori Kota pelaksana terbaik gerakan PKK Bidang Pelaksanaan IVA Test	Kecamatan Guguk Panjang	Provinsi	Harapan I Kategori Kota pelaksana terbaik gerakan PKK Bidang Pelaksanaan IVA Test Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
24	Harapan II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Kelompok UP2K-PKK	Aur Kuning	Provinsi	Harapan II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Gerakan PKK Bidang Kelompok UP2K-PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**Gambar 2.7**

**.Pemberian Piala Kota Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota Bukittinggi**



**Gambar 2.8**

**Kota Bukittinggi memperoleh Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang mendukung kegiatan sehari belajar di luar kelas melalui surat edaran, Walikota Bukittinggi sebagai pelopor sertifikasi ruang bermain ramah anak tahun 2018 dan Sekolah dengan jumlah like video terbanyak di youtube, dalam rangka sehari belajar di luar kelas**



## 2.5.4 Penghargaan dan Prestasi Tahun 2017

**Tabel 2.13**

**Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2017**

No	Tingkat Provinsi atau Nasional	Bidang/ Kategori	Prestasi yang Diraih	Nama/ Lembaga	Ket
1	Nasional	Kota Layak Anak	Pratama	Kementerian PPPA	Lomba Program KKBPk, BKR Flamboyan
2	Provinsi	Bina Keluarga Remaja	Juara II	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
3	Provinsi	Duta Genre	Juara II kategori Putra	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Azbar Lubis
4	Provinsi	Ayah Bunda Genre Award	ABG Award kategori kreator	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Sumitri, S.Pd. Mbiomed
5	Provinsi	Ayah Bunda Genre Award	ABG Award kategori Pengayom	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Bapak Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias
6	Provinsi	Pasangan KB Lestari, 10, 15, 20 th	KB Lestari 15 th	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Yasrizal/Desmawati - Tarok Dipo
7	Provinsi	Lomba Pionering	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Ajang Temu Kreatifitas dan Kemah Bhakti Saka Kencana
8	Provinsi	Lomba Rangking 1 Genre	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	

No	Tingkat Provinsi atau Nasional	Bidang/ Kategori	Prestasi yang Diraih	Nama/ Lembaga	Ket
9	Provinsi	Lomba Fun Cooking Genre	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
10	Provinsi	Lomba Adventure	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
11	Provinsi	Dance Icon Genre	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
12	Provinsi	Lomba Pentas Seni	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
13	Provinsi	UPPKS	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Lomba Program KKBPK/UPPKS Makmur - Gulai Bancah
14	Provinsi	Kegiatan PKK KB Kes	Juara 1 Lomba PKK KB Kes	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Lomba Program KKBPK/UPPKS Makmur - Gulai Bancah



**Gambar 2.9**

**Pemberian Piala Kota Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota Bukittinggi**



**Gambar 2.10**

**Kota Bukittinggi memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Sebagai Kota yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kestetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
  - 2) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas.
- b. Permasalahan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
  - 1) Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta.
  - 2) Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga.
  - 3) Masih rendahnya komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
  - 4) Belum optimalnya kelembagaan PUG.
  - 5) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.
  - 6) Penyediaan Data Gender masih perlu disempurnakan.
  - 7) Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- c. Permasalahan Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak :
  - 1) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.



- 2) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal.
  - 3) Perempuan dan anak banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual.
  - 4) Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal.
  - 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM.
  - 6) Belum optimalnya pelaksanaan kota layak anak dengan kondisi capaian Standar Kota Layak anak masih rendah.
  - 7) Masih kurangnya peran forum anak dalam mendorong kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan hak anak.
  - 8) Belum optimal dan terintegrasinya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - 9) Belum optimal pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
  - 10) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan Perempuan dan anak.
  - 11) Pemahaman Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha terhadap Kota Layak Anak masih rendah.
  - 12) Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- 13) Belum kuatnya satuan tugas di Kelurahan.
- d. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Informasi dan Penyuluhan:
- 1) Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi
  - 2) Belum terarahnya Program SKPD untuk pencapaian Bonus Demografi
  - 3) Lemahnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
  - 4) Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- e. Permasalahan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
- 1) Unmetneed masih tinggi.
  - 2) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR).
  - 3) Rendahnya Partisipasi laki-laki ber KB.

- 4) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan Ketahanan keluarga.
- 5) Masih minimnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) luar sekolah.
- 6) Masih sedikitnya jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada jika dibandingkan dengan jumlah Posyandu yang ada.
- 7) Peran masyarakat dan tokoh agama pada kelompok – kelompok kegiatan belum maksimal.
- 8) Belum optimalnya pengelolaan dan partisipasi masyarakat pada ketahanan keluarga.
- 9) Masih rendahnya jumlah Kelompok kegiatan ketahanan keluarga, UPPKS dan PIK R jalur masyarakat.
- 10) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga penyuluh KKBPK.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi**

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Terpilih dalam RPJMD adalah Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah..

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5. Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
7. Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke 6 **“Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan”**

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan Kualitas Keluarga
  - b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
2. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana
  - b. Meningkatnya Kemandirian Keluarga
  - c. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Hebat dalam sektor Sosial Kemasyarakatan			
1.1	Tujuan Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Belum maksimalnya pegasusutamaa n gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah,	Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaa n perempuan masih belum maksimal.	Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		legislatif dan sektor swasta		
1.1.1	<p>Sasaran :</p> <p>1.Meningkatkan Kualitas Keluarga</p> <p>2.Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan Pendidikan dalam rangka neningkatkan kualitas keluarga</p> <p>Kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Belum merata Pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>Masyarakat lebih cenderung dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dari pada edukasi/Pendi dikan keluarga</p> <p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>Terbatasnya pengetahuan masyarakat dan stake holders tentang Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan komunikasi informasi dan edukasi</p>	<p>Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk terus melakukan Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi/lembag a terkait dalam dalam penanganan kasus.</p> <p>Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Adanya komitmen Pemerintah dalam perlindungan Anak dan Kerjasama yang baik</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perlindungan anak.	kepada masyarakat belum maksimal	dengan Lembaga terkait.
1.2	Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga			
1.2.1	<p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatkan Kesertaan Ber KB</p> <p>2. Meningkatkan Kemandirian Keluarga</p> <p>3. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>Lemahnya KIE tentang program Keluarga Berencana</p> <p>Masih rendahnya pembinaan terhadap kelompok ketahanan keluarga</p> <p>Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi</p>	<p>Tebatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk program KB</p> <p>Tebatasnya kuantitas dan kualitas SDM</p> <p>Tingginya angka kepadatan jumlah penduduk</p>	<p>Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program KB</p> <p>Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program KKBPK</p> <p>Bukittinggi adalah Kota tujuan pendidikan, perdagangan, pariwisata dan kesehatan.</p>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1.a Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

##### **2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

##### **3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan

kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

#### **4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

#### **5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

## **6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.



**Tabel 3.2**

**Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan</b>	SS.1 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	<b>Indikator Kinerja SS.1 :</b>								Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,99	91,21	91,28	91,28	91,33	91,39	
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,10	73,24	73,50	73,74	73,97	74,18	
		c. TPAK Perempuan	Persen	51,89	52,51	53,13	53,76	54,38	55,00	
		d. Indeks PUG Nasional	Indeks	60,02	64,16	67,95	71,03	74,20	76,93	
<b>2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak</b>	SS.2 Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	<b>Indikator Kinerja SS.2 :</b>								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,72	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	
		b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	Persen	10,91	10,19	9,80	9,44	9,08	8,74	
		c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	Persen	NA	247	270	290	315	335	
		d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak.	Persen	NA	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA</b>	SS.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	<b>Indikator Kinerja SS.3 :</b>								Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat	Indeks	NA	5,0	15,0	33,0	55,0	75,0	
		b. Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	61,0	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	
<b>4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO</b>	SS.4 Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi	<b>Indikator Kinerja SS.4 :</b>								Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN)	Persen	94	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	
		b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan	Persen	NA	20	40	60	80	100	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	perempuan korban kekerasan dan TPPO	Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)								
		c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)	Persen	10	20	40	60	80	100	
<b>5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak</b>	SS.5 Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	<b>Indikator Kinerja SS.5 :</b>								Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR 2018)	Persen	62	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	
		b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)	Persen	62	65	68	70	72	75	
		c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	Persen	6,54	6,00	5,27	5,00	4,50	4,00	
		d. Persentase Pemda melaksanakan	Persen	0	0	5	5	5	5	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		layanan sesuai standar								
<b>6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA</b>	SS.6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	<b>Indikator Kinerja SS.6 :</b>								Sekretariat Kementerian PPPA
		a. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	70	75	80	85	90	
		b. Opini BPK atas Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		c. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	4	4	
		d. Nilai SAKIP	Persen	95	96	97	98	99	100	

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<p>Belum maksimalnya peran perempuan dalam pembangunan terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta.</p> <p>Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga</p> <p>Masih belum meratanya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan</p>	Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan masih belum maksimal	Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	<p>Belum optimalnya peran Lembaga Pemenuhan Hak serta Perlindungan khusus Anak karena keterbatasan sumber daya.</p> <p>Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pemenuhan Hak serta perlindungan khusus anak</p>	Belum semua stake holders memahami tentang indikator Pemenuhan Hak Anak	Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak serta perlindungan khusus anak untuk menuju Kota layak anak.
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan Pendidikan dalam rangka neningkatkan kualitas keluarga	Masyarakat lebih cenderung dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dari pada edukasi/Pendidikan keluarga	Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk terus melakukan Peningkatan Kualitas Keluarga
4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dan instansi/ Lembaga terkait penanganan kasus.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	korban kekerasan dan TPPO			
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Belum semua anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus mendapat penanganan optimal	<p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan dan perlindungan khusus terhadap anak.</p> <p>Terbatasnya dukungan anggaran</p>	Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait dalam penanganan kasus.

### 3.3.1.b Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020 - 2024. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas

sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

## **2. Sasaran Strategis BKKBN**

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.



### **3.3.1.c Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.**

##### **1. Visi dan Misi**

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

#### **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2021-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Pada RPJMD 2021-2026 tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Misi 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah.

Tujuan yang hendak dicapai yakni : Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yakni sasaran 3: Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun Tujuan dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 merupakan kajian dari permasalahan dan isu strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	Kab/Kota	17	17	18	18	19	19
		2	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3	Persentase Perempuan di Legislatif	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3
		4	Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
		5	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja	%	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85
	3. Meningkatnya Perlindungan perempuan	6	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun keatas)	Rasio per 100.000	17	16	15	14	13	12
	4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	7	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23
	5. Meningkatnya Perlindungan Anak	8	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	Rasio per 10.000 anak	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96
	6. Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Indeks	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58
		10	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23	23,2	23,2	23,2	23,2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		11. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	Indeks	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10	17,10
II. Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	7. Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Organisasi	12. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	AA
	8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	13. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	%	90	92	94	96	98	100

**Tabel 3.5**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Kota Bukittinggi**

**berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	✓ Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga pemerintah, legislatif dan sektor swasta.	✓ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	✓ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		✓ Belum semua OPD melaksanakan PPRG.	✓ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender.	

		✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG.		
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>✓ Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal.</li> <li>✓ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM</li> </ul>	✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Meningkatnya kualitas keluarga	✓ Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	✓ Pemahaman Stake holders terhadap PUSPAGA minim	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PUSPAGA.
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	✓ Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal	✓ Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang Hak Dasar anak	✓ Pemerintah daerah akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Hak dasar anak.
5	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	✓ Belum adanya penyediaan Data Gender	✓ Keterbatasan SDM	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk penyediaan data gender
6	Meningkatnya perlindungan khusus anak	✓ Belum adanya program PATBM	✓ Pemahaman Stake holders terhadap PATBM minim	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PATBM.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tidak memiliki kajian khusus rencana tata ruang wilayah, jika kemudian hari diperlukan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dokumen KLHS yang memastikan prinsip Pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen mengglobal dan Nasional dalam upaya untuk mensejahterakan Masyarakat menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dinas P3APKB bertanggung jawab dengan tujuan 5 yaitu : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender).

Pemetaan skenario arah kebijakan dan indikasi program untuk indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* :

1. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Arah kebijakan indikator ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan dalam politik yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan Meningkatkan porsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah dan pemda yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

3. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Arah kebijakan Meningkatkan sistem informasi pengguna CPR semua PUS 15 s/d 49 tahun berstatus kawin yang diimplementasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan sub kegiatan :
  - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
  - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
  - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan :
  - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
  - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
  - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
  - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Dengan sub kegiatan :
    - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
    - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
    - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
    - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
    - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.
    - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
    - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
    - Pembinaan Terpadu Kampung KB.
4. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
- Arah kebijakannya adalah Meningkatkan sistem informasi kawin pertama perempuan kawin umur 25 s/d 49 tahun yang diimplementasikan melalui Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.



### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode grouping dan diskusi sebagai berikut :

1. Masih adanya ketimpangan dan permasalahan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan.
3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK.
4. Belum terintegrasinya Pembangunan berbasis kependudukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan Kualitas Keluarga.
  - b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga.  
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan Kemandirian Keluarga.
  - b. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga = Ukuran Tingkat Ketahanan Keluarga Yang Dapat digunakan Sebagai Baseline Perkembangan Tingkat Ketahanan Keluarga	64,53	64,7	65	65,3	65,5	65,8	66
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks yang menggambarkan capaian pembangunan pemenuhan hak anak pada suatu daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi dalam penyusunan perencanaan program, kebijakan dan kegiatan serta bahan evaluasi atas dampak kebijakan yang telah diterapkan	NA	60,73	61,23	61,23	62,23	62,73	63,23

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
2	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	Indeks komposit dari aspek ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64
		Meningkatkan Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	<p>Selama 6 Bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 (satu) orang keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Pokok perbulan</p> <p>Selama 6 Bulan terakhir setiap anggota keluarga makan dengan makanan beragam, bergizi, seimbang aman paling sedikit 2 x sehari</p> <p>Keluarga tinggal dalam rumah layak huni</p> <p>Keluarga memiliki tabungan (simpanan di Bank, uang kontan/tunai, perhiasan, hewan ternak, ada kebun) yg digunakan sewaktu -waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan</p>	NA	65%	70%	72%	74%	77%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perbandingan antara keluarga yang mampu memenuhi dengan jumlah keluarga (pada kelompok UPPKS)							
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,55	2,5	2,45	2,4	2,38	2,28	2,2

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keluarga melalui perwujudan legalitas dan Keutuhan keluarga.
2. Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga.
3. Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Sosial - Psikologis.
4. Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Sosial – Budaya.
5. Meningkatkan Peran Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan Kualitas Keluarga
6. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
7. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
8. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
9. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak.
10. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
11. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

12. Meningkatkan KIE tentang program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
13. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB
14. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
15. Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga.
16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Pengendalian Penduduk.
17. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.
18. Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholders dalam Menyusun Grand desain Pembangunan Kependudukan

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman, lembaga, masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran.
2. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.
3. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
6. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lembaga, pemerintah melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasi.

7. penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
8. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK
10. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan.
11. Peningkatan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk.
12. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendataan.
13. Peningkatan kemitraan lintas sektoral.
14. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
15. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada industri rumahan perempuan.
16. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
17. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
18. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.
19. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK
20. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan
21. Peningkatan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk.
22. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan.
23. Peningkatkan kemitraan lintas sektoral.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.



Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Tahun 2021 – 2026**

<b>VISI :</b>		<b>Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.</b>		
<b>MISI 6 :</b>		<b>Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas keluarga melalui perwujudan legalitas dan Keutuhan keluarga.</li> <li>• Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga.</li> <li>• Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Sosial -Psikologis.</li> <li>• Peningkatan kualitas keluarga dengan penguatan Ketahanan Sosial – Budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman, lembaga, masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran.</li> <li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.</li> <li>• Peningkatan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>• Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.</li> </ul>

<b>VISI :</b>		<b>Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.</b>		
<b>MISI 6 :</b>		<b>Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Peran Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan Kualitas Keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li> <li>Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lembaga, pemerintah melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasi.</li> <li>penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan</li> </ul>
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</li> <li>Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</li> </ul>	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.

<b>VISI :</b>		<b>Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.</b>		
<b>MISI 6 :</b>		<b>Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak.</li> <li>• Memperkuat lembaga / jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.</li> </ul>	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Pengendalian Penduduk.</li> <li>• Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholders dalam Menyusun Grand desain Pembangunan Kependudukan</li> <li>• Meningkatkan KIE tentang progam KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk.</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendataan.</li> <li>• Peningkatan kemitraan lintas sektoral.</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK</li> </ul>

<b>VISI :</b>		<b>Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.</b>		
<b>MISI 6 :</b>		<b>Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB</li> </ul>	
		Meningkatkan Kemandirian Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.</li> <li>• Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

#### **7.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD.
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
  - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
  - 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
  - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 3) Pengadaan Mebel.
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 3) Pemeliharaan Mebel.
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - 6) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **7.2 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
  - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

## **7.3 Program Perlindungan Perempuan**

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota.

- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 1) Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **7.4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota.

#### **7.5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota.

#### **7.6 Program Pemenuhan Hak Anak**

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.



- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.

#### **7.7 Program Perlindungan Khusus Anak**

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.
- b. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota.
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

## **7.8 Program Pengendalian Penduduk**

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
  - 1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota.
  - 2) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.
  - 3) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota.
  - 4) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
  - 5) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
  - 2) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
  - 3) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
  - 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

## **7.9 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
  - 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
  - 4) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - 1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

- 2) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
- 3) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
- 4) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
  - 2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
  - 3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 4) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
  - 5) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.
  - 6) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
  - 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
  - 2) Pembinaan Terpadu Kampung KB.

#### **7.10 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - 3) Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS).
  - 4) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - 6) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
  - 7) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan dan sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Pencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Penanggung Jawab
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
											Target	Rp	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			
							DINAS P3APKKB				10.008.375.946		13.927.671.153		14.917.873.670		16.793.832.103		19.125.464.967		20.234.613.087		95.007.830.926				
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25		61,50		62,00		62,25		62,50		63,00		63,00					
	Meningkatkan Kualitas Keluarga							Indeks Kualitas keluarga	64,53	64,7		65		65,3		65,5		65,8		66		66					
		2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				7.412.635.476		10.136.532.999		12.076.961.981		13.783.356.591		15.794.956.509		16.738.420.199		75.942.863.755				

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							<b>PEREMPUEAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																		
		208	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	<b>BB</b>	<b>BB</b>	4.954.121.414	<b>A</b>	6.312.477.999	<b>A</b>	7.734.125.631	<b>A</b>	8.950.394.789	<b>A</b>	10.450.800.436	<b>A</b>	12.339.841.115	<b>A</b>	50.741.761.384		
		208	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	<b>85%</b>	<b>85%</b>	22.069.950	<b>85%</b>	22.070.000	<b>87%</b>	66.740.000	<b>88%</b>	73.414.000	<b>89%</b>	80.755.400	<b>90%</b>	88.830.940	<b>90%</b>	353.880.290		
		208	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	3 Dokumen	4 Dokumen	22.069.950	3 Dokumen	22.070.000	3 Dokumen	36.740.000	3 Dokumen	40.414.000	3 Dokumen	44.455.400	3 Dokumen	48.900.940	19 Dokumen	214.650.290		
		208	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	6 Dokumen	23.205.000		
		208	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	6 Dokumen	23.205.000		
		208	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	6 Dokumen	23.205.000		
		208	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	6 Dokumen	23.205.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	6.050.000	3 Dokumen	6.655.000	15 dokumen	23.205.000	
		2	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.500.000	4 dokumen	6.050.000	4 dokumen	6.655.000	42 dokumen	23.205.000	
		2	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Tertib Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan.	100%	100%	4.417.088.096	100%	4.612.148.631	100%	4.720.888.631	100%	5.884.799.789	100%	7.338.057.636	100%	9.152.835.735	100%	36.125.818.518	
		2	0	0	2	0	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya	35 Orang	33 Orang	4.417.088.096	36 Orang	4.612.148.631	39 Orang	4.612.148.631	44 Bulan	5.765.185.789	48 Bulan	7.206.482.236	51 Orang	9.008.102.795	51 Orang	35.621.156.178	
		2	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	7 Orang	7 Orang	-	7 Orang	-	7 Orang	78.000.000	7 Orang	85.800.000	7 Orang	94.380.000	7 Orang	103.818.000	7 Orang	361.998.000	
		2	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	55 Dokumen	55 Dokumen	-	55 Dokumen	-	55 Dokumen	5.000.000	60 Dokumen	5.500.000	60 Dokumen	6.050.000	60 Dokumen	6.655.000	60 Dokumen	23.205.000	
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	12 Dokumen		-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.050.000	12 Dokumen	6.655.000	60 Dokumen	23.205.000	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dok ume n	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	5.000. 000	1 Doku men	5.500. 000	1 Dok ume n	6.050. 000	1 Dok ume n	6.655. 000	5 Dok ume n	23.20 5.000	
		2	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaa n yang disiapkan	2 Dok ume n	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n	5.000. 000	2 Doku men	5.500. 000	2 Dok ume n	6.050. 000	2 Dok ume n	6.655. 000	10 Dok ume n	23.20 5.000	
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/tri wulanan/se mesteran yang disiapkan	18 doku men	18 Dok ume n	-	18 dok ume n	-	18 dok ume n	5.740. 000	18 doku men	6.314. 000	18 dok ume n	6.945. 400	18 dok ume n	7.639. 940	90 Dok ume n	26.63 9.340	
		2	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan hasil analisis pronogsis realisasi anggaran yang disusun	1 Dok ume n	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	5.000. 000	1 Doku men	5.500. 000	1 Dok ume n	6.050. 000	1 Dok ume n	6.655. 000	6 Dok ume n	23.20 5.000	
		2	0	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administras i Barang Milik Daerah.	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	56.74 0.000	100 %	62.41 4.000	100 %	68.65 5.400	100 %	75.52 0.940	100 %	263.3 30.34 0	
		2	0	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaa n, Pemindahta ngan, Pemanfaata n dan	32 Dok ume n	32 Dok ume n	-	32 Dok ume n	-	32 Dok ume n	5.000. 000	32 Doku men	5.500. 000	32 Dok ume n	6.050. 000	32 Dok ume n	6.655. 000	160 Dok ume n	23.20 5.000	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun																
		208	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	5 Dokumen	23.205.000	
		208	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	1 Dokumen		-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	5 Dokumen	23.205.000	
		208	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	16 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.500.000	4 dokumen	6.050.000	4 dokumen	6.655.000	20 dokumen	23.205.000	
		208	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	18 Dokumen	0	-	18 Dokumen	-	18 Dokumen	36.740.000	18 Dokumen	40.414.000	18 Dokumen	44.455.400	18 Dokumen	48.900.940	18 Dokumen	170.510.340	
		208	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	-	100%	37.500.000	100%	61.250.000	100%	52.250.000	100%	53.350.000	100%	67.870.000	100%	272.200.000	
		208	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan srapras disiplin pegawai						1 unit	15.000.000		-		-	1 unit	19.965.000		34.965.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		208	001	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	46 Stel	0	0	50 stell	37.50 0.000	55 stell	41.25 0.000	55 stell	46.75 0.000	55 stell	47.30 0.000	55 stell	47.90 5.000	270 stel	220.7 05.00 0	
		208	001	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	5.000. 000	5 Dokumen	5.500. 000	5 Dokumen	6.050. 000	5 Dokumen	-	25 Dokumen	16.55 0.000	
		208	001	206		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Peringkat Daerah		90%	197.9 45.00 0	90%	277.0 00.00 0	90%	445.5 00.00 0	90%	465.6 50.00 0	90%	486.4 65.00 0	90%	517.2 61.50 0	90%	2.389. 821.5 00	
		208	001	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bua h	46 bua h	1.524. 500	46 bua h	5.000. 000	48 bua h	7.500. 000	50 buah	8.000. 000	52 bua h	8.500. 000	54 bua h	8.750. 000	296 bua h	39.27 4.500	
		208	001	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor di sediakan	Unit	8 Unit	48.79 0.000	4 unit	60.00 0.000	4 Unit	65.00 0.000	4 Unit	65.00 0.000	4 Unit	65.00 0.000	4 Unit	65.00 0.000	28 unit	368.7 90.00 0	
		208	001	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				3 bua h	15.00 0.000	3 bh, 1 pake t Gord en	100.0 00.00 0	3 bh, 1 pake t Gord en	101.0 00.00 0	3 bh, 1 pake t Gord en	102.1 00.00 0	3 bh, 1 pake t Gord en	103.3 10.00 0	15 bh, 1 Pake t Gord en	421.4 10.00 0	
		208	001	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor di disediakan	0	21 Jeni s	4.940. 500	21 Jeni s	8.500. 000	21 Jeni s	9.500. 000	21 Jenis	14.00 0.000	21 Jeni s	15.00 0.000	21 Jeni s	15.00 0.000	21 Jeni s	66.94 0.500	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	0 8	0 1 0 6	2 . 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	6 Jenis	7 Jenis	10.29 4.000	7 jenis	17.50 0.000	7 jenis	18.00 0.000	7 jenis	18.50 0.000	7 jenis	19.00 0.000	7 jenis	20.00 0.000	7 jenis	103.2 94.00 0	
		2	0 8	0 1	2 . 0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	0	145 Orang	1.280. 000	120 Orang	6.000. 000	200 Orang	10.00 0.000	240 orang  10 kasus	12.00 0.000	270 Orang	13.50 0.000	300 Paket	15.00 0.000	1.27 5 Orang	57.78 0.000	
		2	0 8	0 1	2 . 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	125 Dokumen	131.1 16.00 0	130 Dokumen	165.0 00.00 0	135 Dokumen	179.0 00.00 0	140 Dokumen	185.0 00.00 0	145 Dokumen	195.0 00.00 0	150 Dokumen	215.0 00.00 0	825 Dokumen	1.070. 116.0 00	
		2	0 8	0 1	2 . 0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Arsip					50 Arsip	6.500. 000	50 Arsip	7.150. 000	50 Arsip	7.865. 000	50 Arsip	8.651. 500	200 Arsip	30.16 6.500	
		2	0 8	0 1	2 . 0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan  Jumlah Sarana prasarana yang tersedia  Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan					1 Orang  1 paket  1 Modul	50.00 0.000	1 Orang  1 paket  1 Modul	55.00 0.000	1 Orang  1 paket  1 Modul	60.50 0.000	1 Orang  1 paket  1 Modul	66.55 0.000	1 Orang  1 paket  1 Modul	232.0 50.00 0		
		2	0 8	0 1	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai			-	70%	712.5 05.00 0	70%	1.618. 367.0 00	70%	1.618. 367.0 00	70%	1.618. 367.0 00	70%	1.618. 367.0 00	70%	7.185. 973.0 00	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Daerah	dengan perencanaa n																	
		2	0 8	0 1	2 . 0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	0	0	0	1 kend araa n R4	482.0 74.00 0	1 kend araa n R4	482.0 74.00 0	1 kend araa n R4	482.0 74.00 0	1 kend araa n R4	482.0 74.00 0	1 kend araa n R4	482.0 74.00 0	1 kend araa n R4	2.410. 370.0 00		
		2	0 8	0 1	2 . 0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru				2 kend araa n R4	670.8 62.00 0	2 kend araa n R4	670.8 62.00 0	2 kend araa n R4	670.8 62.00 0	2 kend araa n R4	670.8 62.00 0	2 kend araa n R4	670.8 62.00 0	2 kend araa n R4	2.683. 448.0 00		
		2	0 8	0 1	2 . 0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0	0	0	1 set kurs i tam u	30.00 0.000	2 kurs i tam u, 50 Kurs i Putar	175.0 00.00 0	2 kursi tam u, 30 Kursi Putar	175.0 00.00 0	2 kurs i tam u, 30 Kurs i Putar	175.0 00.00 0	2 kurs i tam u, 30 Kurs i Putar	175.0 00.00 0	2 kurs i tam u, 30 Kurs i Putar	730.0 00.00 0		
		2	0 8	0 1	2 . 0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru (Contoh: Lift, AC Central)					2 unit	40.00 0.000	2 unit	40.00 0.000	2 unit	40.00 0.000	2 unit	40.00 0.000	2 unit	40.00 0.000	2 unit	160.0 00.00 0	
		2	0 8	0 1	2 . 0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	0	0	0	1 set	200.4 31.00 0	1 set	250.4 31.00 0	1 set	250.4 31.00 0	1 set	250.4 31.00 0	1 set	250.4 31.00 0	1 set	250.4 31.00 0	1.202. 155.0 00	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		208	0108	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.464.000	100%	237.140.000	100%	239.640.000	100%	242.000.000	100%	242.000.000	100%	242.500.000	100%	1.252.744.000	
		208	0108	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	260 materi 6000	Materai 10.000 122 Buah	1.349.000	200 Buah	2.000.000	200 Buah	2.000.000	200 Buah	2.000.000	250 Buah	2.500.000	1.172	11.849.000			
		208	0108	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan  Jumlah rekening tagihan telepon/fax dan Air yang dibayarkan	36 rekening	36 rekening	42.640.000	10.000 kwh  24 rekening	42.640.000	10.000 kwh  24 rekening	42.640.000	10.000 kwh  24 rekening	45.000.000	10.000 kwh  24 rekening	45.000.000	10.000 kwh  24 rekening	50.000 kwh  120 rek	262.920.000		
		208	0108	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Unit	15 unit	5.475.000	30 unit	7.500.000	30 unit	10.000.000	30 unit	10.000.000	30 unit	10.000.000	30 unit	10.000.000	165 unit	52.975.000	
		208	0108	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang			5 orang	185.000.000	5 orang	185.000.000	5 orang	185.000.000	5 orang	185.000.000	5 orang	185.000.000	5 Orang	925.000.000	
		208	0109	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		267.554.368	80%	414.114.368	80%	525.000.000	80%	551.500.000	80%	563.150.000	80%	576.655.000	80%	2.897.973.736	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		208	0109	201	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dipelihara	Unit	1 Kendaraan R4	41.840.000	1 kendaraan R4	45.000.000	1 kendaraan R4	45.000.000	1 kendaraan R4	45.000.000	1 kendaraan R4	45.000.000	1 kendaraan R4	45.000.000	1 kendaraan R4	266.840.000	
		208	0109	202	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	6 kendaraan R4, 33 unit kendaraan R2	6 kendaraan R4, 33 unit kendaraan R2	165.756.904	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	299.156.904	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	300.000.000	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	315.000.000	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	325.000.000	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	350.000.000	6 kendaraan R4, 34 unit kendaraan R2	1.754.913.808	
		208	0109	205	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	0	0	1 set	10.000.000	1 set	15.000.000	1 set	15.000.000	1 set	15.000.000	1 set	15.000.000	5 set	70.000.000	
		208	0109	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit	18 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	59.957.464	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	59.957.464	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	110.000.000	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	121.000.000	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	122.100.000	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	110.000.000	20 Jenis, 1 Kantor, 12 bulan	583.014.928	
		208	0109	210	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (Contoh: Lift, AC Central)					2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.500.000	2 Unit	6.050.000	2 Unit	6.655.000	2 Unit	23.205.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Contoh: Garase, Pagar)					2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	200.0	
		8	1	0	9								Unit	0.000	Unit	0.000	Unit	0.000	Unit	0.000	Unit	0.000	00.00	0
		2	0	0			<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,94 %	4%	402.264.750	4,2 %	710.000.000	4,4 %	740.000.000	4,5%	775.000.000	4,6 %	810.000.000	4,7 %	596.415.750	4,7 %	4.033.680.500	
								Persentase Lembaga Pemerintah yang mendukung Kesetaraan Gender (27 SKPD)		11,11% (3/27)		17,86% (4/27)		21,43 (5/27)		7/28 (6/27)		28,57% (7/27)		28,57% (8/27)		28,57%		
								Persentase Lembaga kemasyarakatan yang mendukung Kesetaraan Gender (23 lembaga)		8,70%		17,39 (4/23)		26,09 (6/23)		34,78 (8/23)		43,48 (10/23)		43,48 (10/23)		43,48 (10/23)		
		2	0	0	2	0	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perrsentase Focal Point Aktif	70%	70%	51.965.000	80%	135.000.000	90%	150.000.000	100 %	175.000.000	100 %	200.000.000	100 %	51.965.000	100 %	763.930.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[illegible]



## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		208	002	201	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan di Bina	28 Organisasi	28 Organisasi	155.849.000	28 Organisasi	350.000.000	28 Organisasi	350.000.000	28 Organisasi	350.000.000	28 Organisasi	350.000.000	28 Organisasi	350.000.000	28 Organisasi	1.905.849.000	
						Jumlah Perempuan yang di bina dalam Bidang Politik	2 Organisasi	2 Organisasi		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
						Jumlah Organisasi Perempuan di fasilitasi dalam penganggaran				2 Organisasi		2 Organisasi		2 Organisasi		2 Organisasi		2 Organisasi		2 Organisasi		
		208	002	202	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan ekonomi	60 Orang	100 Orang	194.450.750	100 Orang	225.000.000	120 orang	240.000.000	130 Orang	250.000.000	150 Orang	260.000.000	150 Orang	194.450.750	700 Orang	1.363.901.500	
						Jumlah Perempuan yang mendapatkan bantuan		4 Kelompok		1 kelompok												
		208	003		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>7,53</b>	<b>7,42</b>	<b>257.351.054</b>	<b>7,31</b>	<b>233.246.000</b>	<b>7,21</b>	<b>300.000.000</b>	<b>7,10</b>	<b>400.000.000</b>	<b>7,00</b>	<b>500.000.000</b>	<b>6,91</b>	<b>600.000.000</b>	<b>6,91</b>	<b>2.290.597.054</b>	
		208	003	201	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN /KOTA.	Persentase Perempuan korban kekerasan	0,75%	0,74%	75.487.000	0,73%	100.000.000	0,72%	150.000.000	0,71%	200.000.000	0,70%	250.000.000	0,69%	300.000.000	0,69%	1.075.487.000	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		208	003	201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi / FGD pencegahan KtP berupa Pertemuan di 3 (tiga) Kecamatan  KIE untuk pencegahan KtP berupa Banner dan Sticker  Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang	3 kali pertemuan	3 kali pertemuan	75.487.000	3 kali pertemuan	100.000.00	3 kali pertemuan	150.000.00	3 kali pertemuan	200.000.00	3 kali pertemuan	250.000.00	3 kali pertemuan	300.000.00	18 kali pertemuan	1.075.487.000	
		208	003	202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	181.864.054	100%	100.000.00	100%	150.000.00	100%	200.000.00	100%	250.000.00	100%	300.000.00	100%	1.181.864.054	
		208	003	202	Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota dasawisma yang memperoleh pendampingan tentang KtP  Penanganan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	10 Orang	240 orang	58.563.054	240 orang	100.000.00	240 orang	150.000.00	240 orang	200.000.00	240 orang	250.000.00	240 orang	300.000.00	1.440 Orang	1.058.563.054	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2004				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	79,5 0%	79, 50 %	979.4 03.85 0	79,7 5%	1.450 .000. 000	80%	1.650 .000. 000	80,2 5%	1.750 .000. 000	80,5 0%	1.875 .000. 000	80,7 5%	979.4 03.85 0	80,7 5%	8.683 .807. 700	
		208	04	201		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga		4,6 0%	979.4 03.85 0	7,30 %	1.450. 000.0 00	10,1 5%	1.650. 000.0 00	13%	1.750. 000.0 00	16%	1.875. 000.0 00	20%	979.4 03.85 0	20%	8.683. 807.7 00	
		208	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang d bina	720 Kelu arga	720 Kel uar ga	527.7 35.49 2	720 kelu arga	850.0 00.00 0	720 kelu arga	900.0 00.00 0	720 Kelu arga	950.0 00.00 0	720 Kelu arga	975.0 00.00 0	720 Kelu arga	527.7 35.49 2	4.32 0 Kelu arga	4.730. 470.9 84	
		208	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah PKK aktif  Jumlah Dasawisma Aktif	3 keca mata n. 24 kelu raha n aktif	3 kec ama tan. 24 kelu rah an akti f	451.6 68.35 8	3 keca mat an. 24 kelu raha n aktif	600.0 00.00 0	3 keca mat an. 24 kelu raha n aktif	750.0 00.00 0	3 keca mata n. 24 kelur ahan aktif	800.0 00.00 0	3 keca mat an. 24 kelu raha n aktif	900.0 00.00 0	3 keca mat an. 24 kelu raha n aktif	451.6 68.35 8	3 keca mat an. 24 kelu raha n aktif	3.953. 336.7 16	
								850 Kelo mpo	850 Kelo		860 Kelo mpo	870 Kelo mpo	880 Kelo mpo k		890 Kelo mpo		900 Kelo mpo						

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

								k	mpo k		k		k			k		k		k			
		2	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak</b>	<b>100 %</b>	<b>27.73 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>80.00 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>85.00 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>90.00 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>95.00 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>27.73 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>405.4 60.00 0</b>	
		2	0	0	2		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah lembaga/SK PD yang menyediakan data terpilah	30	27.73 0.000	30	80.00 0.000	30	85.00 0.000	30	90.00 0.000	30	95.00 0.000	30	27.73 0.000	30	405.4 60.00 0	
		2	0	0	2	0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Update data gender dan anak  Jumlah buku Profil Gender dan Anak	11 Jenis  5 Buku	11 Jenis  25 Buku	27.73 0.000	11 jenis kelompok data  27 Buku	11 jenis kelompok data  27 Buku	85.00 0.000	11 jenis kelompok data.  27 Buku	90.00 0.000	11 jenis kelompok data  27 Buku	95.00 0.000	11 jenis kelompok data  27 Buku	27.73 0.000	11 jenis kelompok data  27 Buku	405.4 60.00 0	

	Meni ngka tkan Peme nuha n Hak Anak						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		60, 73		61,2 3		61,7 3		62,2 3		62,7 3		63,2 3		63,2 3				
							Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarka n Kategori		Ma dya		Nind ya		Nind ya		Nind ya		Nind ya		Nind ya		Nind ya				
		2	0 8	0 6			PROGRAM PEMENUHA N HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Klaster Pemenuhan Hak Anak  Pokja KLA aktif		60 %  6 Pok ja	452.3 42.40 8	63%  10 Pokj a	625.0 00.00 0	66%  15 Pokj a	600.0 00.00 0	69%  20 Pokj a	700.0 00.00 0	72%  25 Pokj a	750.0 00.00 0	75%  27 Pokj a	800.0 00.00 0	75%  27 Pokj a	3.927 .342. 408		
		2	0 8	0 6	2 .0 1		Pelembagaa n PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase indikator Pemenuhan Hak Anak		60%	320.0 00.00 0	60%	425.0 00.00 0	60%	500.0 00.00 0	60%	575.0 00.00 0	60%	600.0 00.00 0	60%	625.0 00.00 0	60%	3.045. 000.0 00		
		2	0 8	0 6	2 .0 1	0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah pendamping an Kelurahan Layak Anak	6	6	170.0 00.00 0	7	250.0 00.00 0	8	300.0 00.00 0	9	350.0 00.00 0	10	350.0 00.00 0	11	350.0 00.00 0	11	1.770. 000.0 00		
								Jumlah Pendamping an Pelayanan Kesehatan Ramah Anak	6	6		6		6		7		7		7		7			

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendamping an Satuan Pendidikan Ramah Anak	10	10		15		20		25		30		35		35		
								Jumlah Pendamping an Ruang Bermain Ramah Anak	1	1		1		1		2		2		3		3		
								Jumlah Pendamping an Pusat Informasi Sahabat Anak	0	0		1		1		2		2		3		3		
								Jumlah Pendamping an Pusat Kreatifitas Anak	0	0		1		1		2		2		3		3		
								Jumlah Pendamping an Rumah Ibadah Ramah Anak				1				1				1		3		
		2 8	0 6	0 6	2 . 0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Forum Anak yang dibina	4	4 45	150.0 00.00 0	5 45	175.0 00.00 0	6 50	200.0 00.00 0	7 50	225.0 00.00 0	8 60	250.0 00.00 0	9 60	275.0 00.00 0	9 155	1.275. 000.0 00	
		2 8	0 6	0 6	2 . 0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Persentase Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatka n	90%	90%	132.3 42.40 8	90%	200.0 00.00 0	90%	100.0 00.00 0	90%	125.0 00.00 0	90%	150.0 00.00 0	90%	175.0 00.00 0	90%	882.3 42.40 8	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Kabupaten/ Kota	pembinaan dan penguatan kelembagaa n.																
		2 0 8	0 6	2 0 2	0 1		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang terlayani  Jumlah Lembaga layanan anak tingkat kelurahan dan kecamatan aktif dan terlatih  Jumlah Penanganan dan Pendamping an anak korban pasca kekerasan	27  24 kelu raha n  30 Kasu s	30 kas us  24 kelu rah an  30 Kas us	132.3 42.40 8	33 kasu s  24 kelu raha n 3 Keca mat an  30 Kas us	200.0 00.00 0	24 kelu raha n 3 Keca mat an  30 Kas us	100.0 00.00 0	24 kelur ahan 3 Keca mata n  30 Kasu s	125.0 00.00 0	24 kelu raha n 3 Keca mat an  30 Kas us	150.0 00.00 0	24 kelu raha n 3 Keca mat an  30 Kas us	175.0 00.00 0	24 Kelu raha n 3 Keca mat an  180 Kas us	882.3 42.40 8	
		2 0 8	0 7				PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak  Persentase anak yang memerluka n perlindung an khusus (15 kategori anak )	73,7 2	70, 72  0.2 2%	339.4 22.00 0	67,1 2  0.24 %	725.8 09.00 0	64,2 5  0.26 %	967.8 36.35 0	61,6 1  0.28 %	59,1 8  0.30 %	1.314 .156. 073	56,9 3  0,32 %	1.395 .029. 484	56,9 3  0,32 %	5.860 .214. 709		



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		3	0	0	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase anak yang membutuhkan Perlindungan khusus yang terlayani	40%	50%	52.48 8.000	60%	205.0 00.00 0	70%	252.0 00.00 0	75%	285.0 00.00 0	80%	350.0 00.00 0	90%	370.0 00.00 0	90%	1.514. 488.0 00	
		2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendampingan terhadap Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus  Indikator Perlindungan anak yang dievaluasi  Pendampingan Sistem pidana peradilan anak  Jumlah Rakor dan Evaluasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Perlindungan anak	140 orang  0  20 Orang	100 Orang  5 Indikator  25 Orang  25 Orang	52.48 8.000	55.00 0.000	57.00 0.000	5 Indikator  25 Orang  1 kali	60.00 0.000	5 Indikator  25 Orang  1 kali	65.00 0.000	5 Indikator  25 Orang  1 kali	70.00 0.000	5 Indikator  150 Orang  5 kali	359.4 88.00 0			
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendampingan terhadap Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus  Pertemuan			0	100 Orang  1 Kali Pertemuan	150.0 00.00 0	100 Orang  1 Kali Pertemuan	195.0 00.00 0	100 Orang  1 Kali Pertemuan	225.0 00.00 0	100 Orang  1 Kali Pertemuan	285.0 00.00 0	100 Orang  1 Kali Pertemuan	300.0 00.00 0	500 Orang  1 Kali Pertemuan	1.155. 000.0 00	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtA				an		an		n		an		an		an		
							Pengembangan Materi KIE KtA				1 Paket Materi KIE KtA		1 Paket Materi KIE KtA		1 Paket Materi KIE KtA		1 Paket Materi KIE KtA		1 Paket Materi KIE KtA		1 Paket Materi KIE KtA		
							Pelaksanaan Promosi dan KIE Pencegahan KtA berupa Pengadaan Banner dan Iklan Layanan Masyarakat				1 Iklan Layanan Masyarakat		1 Iklan Layanan Masyarakat		1 Iklan Layanan Masyarakat		1 Iklan Layanan Masyarakat		1 Iklan Layanan Masyarakat		1 Iklan Layanan Masyarakat		
							Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan KtA (PATBM)				3 Kali Pertemuan		3 Kali Pertemuan		3 Kali Pertemuan		3 Kali Pertemuan		3 Kali Pertemuan		3 Kali Pertemuan		
		208	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat	Persentase anak korban kekerasan	7,37 %	7,0 3%	180.2 14.00 0	6,71 %	157.2 49.00 0	6,42 %	330.8 36.35 0	6,16 %	382.9 61.80 3	5,92 %	439.1 56.07 3	5,69 %	500.0 29.48 4	5,69 %	1.990. 446.7 09	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Daerah Kabupaten/ Kota																	
		2 8	0 7	0 7	2 0 2	0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang terlayani	27	30 Kas us		33 kasu s		30 Kas us	150.0 00.00 0	30 Kasu s	175.0 00.00 0	30 Kas us	200.0 00.00 0	30 Kas us	225.0 00.00 0	30 Kas us	750.0 00.00 0	
		2 8	0 7	0 7	2 0 2	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penanganan dan Pendampingan Anak Korban Pasca Kekerasan		20 Kas us	180.2 14.00 0	Men u DAK	157.2 49.00 0	Men u DAK	180.8 36.35 0	Men u DAK	207.9 61.80 3	Men u DAK	239.1 56.07 3	Men u DAK	275.0 29.48 4	Men u DAK	1.240. 446.7 09	
		2 8	0 7	0 7	2 0 3		Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/	Persentase Lembaga Layanan anak aktif		60%	106.7 20.00 0	65%	363.5 60.00 0	70%	385.0 00.00 0	75%	450.0 00.00 0	80%	525.0 00.00 0	90%	525.0 00.00 0	90%	2.355. 280.0 00	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							Kota																	
		208	07	03	201		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Dibina  Pembinaan dan Fasilitasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Disabilitas	0	0%	0	25 Orang	125.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	165.000.000	25 Orang	180.000.000	25 Orang	180.000.000	125 Orang	800.000.000	
		208	07	03	202		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/ Kota.	Manajemen Pelaksanaan DAK NF PPPA  Jumlah peserta Pelatihan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan dan Anak Kelurahan  Jumlah peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	12 bulan  50 Orang  100 Orang	DAK		12 bulan  50 Orang  100 Orang	43.560.000	12 bulan  50 Orang  100 Orang		12 bulan  50 Orang  100 Orang		12 bulan  50 Orang  100 Orang		12 bulan  50 Orang  100 Orang		12 bulan  50 Orang  100 Orang	43.560.000	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2007.03	Koordinasi dan Sinkronisasi jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PATBM terbentuk, aktif dan terlatih	24 Kelurahan	24 Kelurahan	106.720.000	24 Kelurahan	195.000.000	24 Kelurahan	235.000.000	24 Kelurahan	285.000.000	24 Kelurahan	345.000.000	24 Kelurahan	345.000.000	24 Kelurahan	1.511.720.000				
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga							Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	55	56,5		58		59,5		61		62,5		64		64		
	Terkendal Laju Pertumbuhan penduduk						Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5		2,45		2,40		2,38		2,28		2,20		2,20		
							URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.595.740.470		3.791.138.154		2.840.911.689		3.010.475.511		3.330.508.459		3.496.192.889		19.064.967.172	
		2014	2012				PROGRAM PENGENDALIAN	Total Fertility	2,55	2,5	128.759.20	2,45	366.900.00	2,40	367.000.00	2,38	495.000.00	2,28	555.000.00	2,20	775.000.00	2,20	2.687.659.

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							LIAN PENDUDUK	Rate (TFR)		0.4 1	0	0,43	0	0.48	0	0,51	0	0,55	0	0.6	0	0.6	200	
								Indeks Pembangun an Berwawasa n Kependudu kan (IPBK)																
		2 4	1 2	0 2	2 0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk	Jumlah sinkronisasi Kebijakan yang mengatur tentang Kuantitas Penduduk  Jumlah sinkronisasi Kebijakan yang mengatur tentang Kualitas Penduduk		1 kebi jaka n  1 Keb ijak an	128.7 59.20 0	1 kebij akan  1 Kebi jaka n	195.0 00.00 0	1 Kebi jaka n  1 Kebi jaka n	205.0 00.00 0	1 Kebij akan  1 Kebij akan	255.0 00.00 0	1 Kebi jaka n  1 Kebi jaka n	310.0 00.00 0	1 Kebi jaka n  1 Kebi jaka n	345.0 00.00 0	6 Kebi jaka n  6 Kebi jaka n	1.438. 759.2 00	
		2 4	1 2	0 2	2 0 1	0 2	Penyusunan dan Pemanfaata n Grand Design Pembangun an Kependuduk an (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Grand design tersedia  Jumlah Peserta Sosialisasi/ sinkronisasi GDPK	1	5	128.7 59.20 0		50.00 0.000	10 SKP D	60.00 0.000	20 SKP D	70.00 0.000	30 SKP D	75.00 0.000	30 SKP D	80.00 0.000	30 SKP D	463.7 59.20 0	
		2 4	1 2	0 2	2 0 1	0 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependuduk an Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Penyelengga raan Pendidikan Formal		1 seko lah		4 seko lah	70.00 0.000	7 seko lah	80.00 0.000	10 sekol ah	90.00 0.000	15 seko lah	120.0 00.00 0	20 seko lah	130.0 00.00 0	20 seko lah	490.0 00.00 0	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		24	14	02	201	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah materi Pendidikan Kependudukan yang diintegrasikan dengan materi mata pelajaran sekolah				5 Mata pelajaran	25.000.000	5 Mata pelajaran	30.000.000	5 Mata pelajaran	35.000.000	5 Mata pelajaran	50.000.000	5 Mata pelajaran	65.000.000	5 Mata pelajaran	205.000.000	
		24	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta Sarasehan  Jumlah peserta Sinkronisasi Data Keluarga				100 Orang	20.000.000		20 Orang	20.000.000	100 Orang	25.000.000	25 Orang	30.000.000	200 Orang 50 Orang	95.000.000		
		24	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK dilaksanakan  Jumlah kesepakatan rapat	12 kali		0	12 kali  4 Kesepakatan	30.000.000	12 kali  5 Kesepakatan	35.000.000	12 kali  6 Kesepakatan	40.000.000	12 kali  7 Kesepakatan	40.000.000	12 kali  8 Kesepakatan	40.000.000	60 Kali  8 Kesepakatan	185.000.000	
		24	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	proyeksi penduduk	121.028	123.000	0	125.000	171.900.000	127.000	162.000.000	129.000	240.000.000	131.000	245.000.000	133.000	430.000.000	133.000	1.248.900.000	
		24	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah indikator profil Kependudukan Tersusun			0	30 Indikator	27.500.000	30 Indikator	30.000.000	30 Indikator	30.000.000	30 Indikator	30.000.000	30 Indikator	30.000.000	30 Indikator	147.500.000	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		24	10	20	20	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah DataKu di Kampung KB				3 Rum ah Data Ku	70.00 0.000	4 Rum ah Data Ku	77.00 0.000	5 Rum ah Data Ku	150.0 00.00 0	6 Rum ah Data Ku	150.0 00.00 0	7 Rum ah Data Ku	150.0 00.00 0	7 Rum ah Data Ku	597.0 00.00 0	
		24	10	20	20	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Keluarga yang terupdate  Jumlah Keluarga yang di Data	26.0 00. KK	24. 998 . KK	0	24.9 98. KK	-	25.2 20. KK	55.00 0.000	25.5 00. KK	60.00 0.000	25.8 00. KK	65.00 0.000	31.0 00 KK	250.0 00.00 0	31.0 00 KK	430.0 00.00 0	
		24	10	20	20	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				Men u DAK	74.40 0.000	Men u DAK									74.40 0.000	
		24	10	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)  Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68%  32,4%	68,29%  32,48%	2.279.040.770	68,5%  33%	2.128.042.004	68,75%  33,18%	1.926.860.389	69,0%  33,21%	1.925.616.516	69,1%  33,41%	2.160.545.614	69,25%  33,52%	2.075.985.618	69,25%  33,52%	12.496.090.911	



## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[illegible]

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

								melalui Mupen																
		2 4	1 3	0 1	2 0	0 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPB	Jumlah Balai Penyuluh yang diberikan tunjangan biaya Operasional	3 Balai Penyuluh	3 Balai Penyuluh	220.2 48.00 0	Menu DAK	121.5 00.00 0	Menu DAK	0	Menu DAK	0	Menu DAK	0	Menu DAK	0	Menu DAK	341.7 48.00 0	
		2 4	1 3	0 2	2 0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayaguna kan untuk perencanaa n dan pelaksanaa n Pembangun an daerah		100 %	1.241. 934.4 66	100 %	1.172. 275.6 00	100 %	1.329. 616.9 40	100 %	1.309. 434.4 81	100 %	1.517. 021.5 28	100 %	1.417. 713.4 29	100 %	7.987. 996.4 44	
		2 4	1 3	0 2	2 0	0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader yang dibina	0	0	0	189 PPK BK dan Sub PPK BK	90.00 0.000	189 PPK BK dan Sub PPK BK	110.0 00.00 0	189 PPKB K dan Sub PPKB K	150.0 00.00 0	189 PPK BK dan Sub PPK BK	165.0 00.00 0	189 PPK BK dan Sub PPK BK	170.0 00.00 0	189 PPK BK dan Sub PPK BK	685.0 00.00 0	
		2 4	1 3	0 2	2 0	0 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah rehabilitasi bangunan fisik Penunjang Program KB  Jumlah Mobilitas dan sarana penunjang Program KB	0	4 Bangunan	297.7 47.00 0	Menu DAK	0	100 %	100.0 00.00 0	0	0	100 %	150.0 00.00 0	0	0	0	547.7 47.00 0	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2 4	1 4	0 3	2 0 2	0 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah penghargaan Tingkat Kota  Jumlah Partisipasi Peringatan Hari Keluarga			71.54 4.000	3 Peng harg aan  3 kali	82.27 5.600	3 Peng harg aan  3 kali	94.61 6.940	3 Peng harg aan  3 kali	108.8 09.48 1	3 Peng harg aan  3 kali	125.1 30.90 3	3 Peng harg aan  3 kali	143.9 00.53 9	15 Peng harg aan  15 kali	626.2 77.46 3	
		2 4	1 4	0 3	2 0 2	0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBK aktif  Jumlah sub PPKBK aktif  Jumlah kelompok kegiatan aktif		24 PPK BK  165 sub PPK BK  85 pok tan	872.6 43.46 6	24 PPK BK  165 sub PPK BK  95 pokt an	1.000. 000.0 00	24 PPK BK  165 sub PPK BK,  95 pokt an	1.025. 000.0 00	24 PPKB K  165 sub PPKB K,  95 pokt an	1.050. 625.0 00	24 PPK BK  165 sub PPK BK,  95 pokt an	1.076. 890.6 25	24 PPK BK  165 sub PPK BK,  95 pokt an	1.103. 812.8 91	24 PPK BK  165 sub PPK BK,  95 pokt an	6.128. 971.9 82	
		2 4	1 4	0 3	2 0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan PUS yang Ingin BerKB Tidak Terpenuhi (unmetneed)	29,4 4	25, 51	497.4 54.80 4	23,2 0	639.9 14.40 4	21,5 7	400.5 43.44 9	20,3 0	407.6 82.03 5	19,2 7	412.9 24.08 6	19,2 7	418.2 72.18 8	19,2 7	2.776. 790.9 67	

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		24	14	03	20	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memperoleh distribusi Alokon	24 Faskes	24 Faskes	0	27 Faskes	15.000.000	27 Faskes	15.000.000	28 Faskes	15.000.000	29 Faskes	15.000.000	29 Faskes	15.000.000	29 Faskes	75.000.000	
		24	14	03	20	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah peserta peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik Alokon	30 Orang	30 Orang	0	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	150 Orang	100.000.000			
		24	14	03	20	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang menggunakan MKJP	677 Akseptor	677 Akseptor	0	730 Akseptor	161.000.000	733 Akseptor	185.000.000	740 Akseptor	188.000.000	744 Akseptor	189.000.000	745 Akseptor	190.000.000	3.692 Akseptor	913.000.000	
		24	14	03	20	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah komplikasi dan kegagalan penggunaan MKJP	0 Kasus	0 Kasus	0	3 Kasus	15.000.000	3 Kasus	15.000.000	3 Kasus	15.000.000	3 Kasus	15.000.000	15 Kasus	75.000.000			

## Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	1 4	0 3	2 .0 3	0 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Bhakti Sosial Pelayanan KB  Jumlah Akseptor baru IUD Implan yang di KIE kader  Jumlah akseptor yang dilayani KB  Jumlah Klinik KB yang melayani KB  Jumlah PUS yang di KIE  Jumlah peserta KB baru (PB)  Jumlah peserta KB aktif (PA)		4 Kegi ata n  800 Aks epto r  1.7 00 Aks epto r  24 Klin ik  15. 577  1.3 14  10. 908	161.5 05.80 4         	4 Kegi atan  820 Akse ptor  1.78 5 Akse ptor  25 Klini k  15.6 07  1.34 4  10.9 38	161.5 05.80 4         	4 Kegi atan  850 Akse ptor  1.83 5 Aksp  27 Klini k  15.6 37  1.37 4  10.9 68	165.5 43.44 9         	4 Kegia tan  890 Akse ptor  1.89 0Aks eptor  27 Klini k  15.6 67  1.40 4  10.9 98	169.6 82.03 5         	4 Kegi atan  900 Akse ptor  1.92 7 Akse pt  28 Klini k  15.6 97  1.43 4  11.0 28	173.9 24.08 6         	4 Kegi atan  910 Akse ptor  1.96 5 Akse ptor  29 Klini k  15.7 27  1.46 4  11.0 58	178.2 72.18 8         	24 Keg  5.17 0 Akse ptor  11.1 02 Akse ptor  29 Klini k  90.9 13  8.33 4  65.2 68	1.010. 433.3 67         	
		2	1 4	0 3	2 .0 3	1 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah alat dan obat kotrasepsi didistribusi kan  Jumlah Faskes yang melayani KB terregistrasi  Jumlah KB baru MKJP		23 Alo kon  12 Fas kes Klin ik KB  490 Aks	335.9 49.00 0         	Men u DAK         	267.4 08.60 0         	Men u DAK         	-         	Men u DAK         	Men u DAK         	         	Men u DAK         	603.3 57.60 0         				

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

								terlayani		ep to r														
		2 4	1 3	0 4	2 0 4		Pemberdaya an dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB klasifikasi dasar  Jumlah Kampung KB Berkemban g  jumlah Kampung KB Paripurna		6 Ka mp ung KB	199.4 17.50 0	6 Kam pun g KB  1 Kam pun g KB	164.3 52.00 0	6 Kam pun g KB  1 Kam pun g KB	71.70 0.000	6 Kam pun g KB  2 Kam pun g KB	78.50 0.000	6 Kam pun g KB  2 Kam pun g KB	85.60 0.000	4 Kam pun g KB  3 Kam pun g KB	90.00 0.000	4 Kam pun g KB  3 Kam pun g KB	689.5 69.50 0	
		2 4	1 3	0 4	2 0 4	0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB		3 pem bin aan	152.1 12.00 0	Men u DAK	103.5 00.00 0	Men u DAK		Men u DAK		Men u DAK		Men u DAK		Men u DAK	255.6 12.00 0	
		2 4	1 3	0 4	2 0 4	0 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina  Jumlah SKPD yang memiliki komitmen terhadap pembinaan kampung KB  Jumlah Program SKPD yang terintegrasi di Kampung KB  Jumlah optimalisasi	6	6 Ka mp ung KB	47.30 5.500	7 Kam pun g KB  2 SKP D  2 Prog ram  1 Infra stru ktur  1	60.85 2.000	7 Kam pun g KB  4 SKP D  4 Prog ram  2 Infra stru ktur  2	71.70 0.000	7 Kam pun g KB  6 SKP D  6 Prog ram  3 Infra struk tur  3	78.50 0.000	7 Kam pun g KB  8 SKP D  8 Prog ram  4 Infra stru ktur  4	85.60 0.000	7 Kam pun g KB  9 SKP D  9 Prog ram  5 Infra stru ktur  5	90.00 0.000	7 Kam pun g KB  9 SKP D  9 Prog ram  5 Infra stru ktur  5	433.9 57.50 0	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

								infrastrukt r di kampung KB				Mitr a kerj a		Mitr a kerj a		Mitra kerja		Mitr a kerj a		Mitr a kerj a		Mitr a kerj a		
								Jumlah dukungan mitra kerja di kampung KB																
	Meni ngka t kan Kem andir ian Kelu arga							Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (basis data kelompok UPPKS)	NA	65 %		70%		72%		74%		77%		80%		80%		
		2 4	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDA YAAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTER A (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif	80%  0%	80%  0%	187.9 40.50 0	80%  1 PPK S	1.296. 196.1 50	80%  1 PPK S	547.0 51.30 0	85%  2 PPKS	589.8 58.99 5	85%  2 PPK S	614.9 62.84 4	85%  3 PPK S	645.2 07.27 1	85%  3 PPK S	3.881. 217.0 60	
		2 4	1 4	0 4	2 .0 1		Pelaksanaan Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga	Cakupan Kelompok Kegiatan yyang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Fungsi Reproduksi, Fungsi Perlindunga n dan Fungsi Ekonomi	100 %	100 %	109.8 04.50 0	100 %	955.9 20.00 0	100 %	445.0 00.00 0	100 %	472.5 00.00 0	100 %	480.0 00.00 0	100 %	490.0 00.00 0	100 %	2.953. 224.5 00	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	1	0	2	0	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah pembentukan PIK R jalur masyarakat  Jumlah pembentukan PIK R jalur Pendidikan  Jumlah kelompok BKB terbentuk  Jumlah Kelompok BKR terbentuk  Jumlah kelompok BKL terbentuk	3	4	0	5	20.00 0.000	6	20.00 0.000	7	20.00 0.000	8	20.00 0.000	9	20.00 0.000	9	100.0 00.00 0	
		2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi sarana dan ditertibkan administrasi .	51 BKB, 20 B, BKR, 24 BK BKL, 24 R, 24 PIK BKL R, , 24 27 PIK R, 27 UPP R, KS 27 UPP KS	51 BK B, 20 BK B, 24 BK BKL, 24 R, 24 BKL , 24 PIK R, 27 PIK R, 27 UPP R, 27 UPP KS	0	51 BKB , 20 BKR , 24 BKL, 25 26 PIK R, 27 UPP KS	20.00 0.000	51 BKB , 20 BKR , 24 BKL, 26 PIK R, 27 UPP KS	25.00 0.000	51 BKB, 20 BKR, 24 BKL, 27 PIK R, 27 UPP KS	27.50 0.000	51 BKB , 20 BKR , 24 BKL, 28 PIK R, 27 UPP KS	30.00 0.000	51 BKB , 20 BKR , 24 BKL, 29 PIK R, 27 UPP KS	35.00 0.000	51 BKB , 20 BKR , 24 BKL, 29 PIK R, 27 UPP KS	137.5 00.00 0	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		24	14	04	201	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	Jumlah kader yang mendapat Pelatihan Bina Keluarga				30 Orang		60 Orang		90 Orang		90 Orang		90 Orang		360 Orang		
		24	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)				Menu DAK	615.920.000											615.920.000	
		24	14	04	201	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah peserta yang dilatih tentang Pencegahan stunting  Jumlah remaja yang dilatih tentang Penyiapan kehidupan	-	30 Orang  20 Orang	109.804.500	60 Orang  60 Orang	100.000.000	60 Orang  60 Orang	150.000.000	60 Orang  60 Orang	175.000.000	60 Orang  60 Orang	180.000.000	60 Orang  60 Orang	185.000.000	300 Orang  330 Orang	899.804.500	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2 4	1 4	0 4	2 0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra Kerja yang Terlibat dalam Pembangunan Keluarga	52%	53%	78.13 6.000	55%	340.2 76.15 0	56%	102.0 51.30 0	57%	117.3 58.99 5	59%	134.9 62.84 4	60%	155.2 07.27 1	60%	927.9 92.56 0	
		2 4	1 4	0 4	2 0 2	0 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Mitra kerja yang diberikan sosialisasi		98 Ora ng	78.13 6.000		340.2 76.15 0	3 Mitr a Kerj a / Orm as	102.0 51.30 0	4 Mitra Kerja / Orm as	117.3 58.99 5	4 Mitr a Kerj a / Orm as	134.9 62.84 4	5 Mitr a Kerj a / Orm as	155.2 07.27 1	5 Mitr a Kerj a / Orm as	927.9 92.56 0	
							Jumlah peserta Pelatihan Administrasi kelompok dan administrasi Pra Koperasi			78 Ora ng														
							Peserta Pelatihan Evaluasi Kelompok UPPKS			78 Ora ng		23 Kelo mpo k				24 Kelo mpo k		24 Kelo mpo k		24 Kelo mpo k		24 Kelo mpo k		
							Pelatihan Evaluasi Koperasi			92 Ora ng		3 kelo mpo k		23 Kelo mpo k										
							Pelatihan teknik Packing Produk UPPKS							6 kelo mpo k		9 kelo mpo k		12 kelo mpo k		15 kelo mpo k		15 kelo mpk		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[illegible]

## **Bab VII**

### **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

#### **7.1 Indikator Kinerja**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00
2	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	64
3	Indeks Kualitas Keluarga	64,53	64,7	65	65,3	65,5	65,8	66	66
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	NA	60,73	61,23	61,23	62,23	62,73	63,23	63,23
5	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
6	Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	NA	65%	70%	72%	74%	77%	80%	80%
7	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	2,45	2,4	2,38	2,28	2,2	2,2

**Tabel 7.2**  
**Target Capaian Aspek dan Indikator Kinerja Menurut**  
**Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Dinas P3APKB Tahun 2021 s.d 2026**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50,19	50,2	50,21	50,22	50,23	50,24	50,25	50,25
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8	8	8	8	12	12	12	12
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	76,48	76,75	76,85	76,95	77,00	77,15	77,30	77,30
4	Rasio KDRT	13,48	12,83	12,18	11,53	10,88	10,23	9,58	9,58
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	1,53	1,44	1,35	1,27	1,18	1,09	1,00	1,00
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,51	60,51	60,65	60,75	60,85	60,95	70	70
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	95	90	90	90	90	90	90	90

11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29
14	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	50,05	50,10	50,15	50,20	50,25	50,39	50,35	50,35
15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	80,67	80,67	80,68	80,69	80,7	80,71	80,72	80,72
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,55	1,5	1,5	1,5	1,48	1,48	1,48	1,48
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	2,45	2,4	2,38	2,28	2,2	2,2
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	34,5	34,5	35	36	36	37	37	37
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	5	5	5	6	6	6
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	3	5	7	9	14	16	16
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB (%)	68	68,2	68,5	68,9	69	69,2	69,25	69,25
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	68,08	68,29	68,5	68,75	69	69,1	69,25	69,25



11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	7,52	2,24	2,21	2,19	2,1	2	2	2
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	19,88	19,69	19,36	19,02	18,34	16,98	16,64	16,64
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,93	8,63	8	7,7	7,4	7,45	7,48	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	32,4	32,48	33	33,18	33,21	33,41	33,52	33,52
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	18,98	18,98	18,75	18,65	18,5	18,3	17	17
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86,00	86,00	86,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	66,80	66,90	67,00	67,00	67,10	67,20	67,30	67,30
29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21	22	22	23	23	24	24
30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	14,49	17,21	20,00	23,00	25,00	27,00	30,00	30,00
31	Cakupan peserta KB aktif (%)	68,08	68,29	68,5	68,75	69	69,1	69,25	69,25

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas P3APPKB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas wajib berpedoman pada Renstra Dinas P3APPKB.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE, MM  
NIP. 19630629 198302 2 001